



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN SEMESTER I TAHUN 2025

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I PADANG**



KATA PENGANTAR



Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara / Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja ini berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama Tahun 2025 dalam kurun waktu 2025–2029 serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang sampai dengan Semester I tahun 2025. Kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan tugas tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait. Saran yang membangun sangat kami harapkan, untuk mengatasi tantangan yang ditemukan demi peningkatan pencapaian kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada tahun mendatang. Semoga segala upaya yang telah kita lakukan mendapat rahmat dan ridho-Nya.



Padang, 30 Juni 2025
Kepala BKK Kelas I Padang,

dr. Mawari Edy, M.Epid
NIP. 197406012002121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Padang Semester I Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban kinerja BKK Kelas I Padang yang menggambarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang diperjanjikan antara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dengan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit. Sebagai salah satu UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2), maka orientasi kerjanya adalah mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Program P2 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dijanjikan oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dengan Direktur Jenderal P2 dan pada Semester I Tahun 2025 terdapat 5 indikator yang telah mencapai target yang ditentukan dan 3 indikator yang masih belum mencapai target yang diharapkan seluruh indikator akan tercapai pada akhir periode 2025. Berikut capaian target Perjanjian Kinerja Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada Semester I Tahun 2025 :

1. Indikator indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan / bandara/ PLBDN dengan capaian 98,95% dimana realisasi sebesar 0,94 dari target 0,95.
2. Indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan capaian 105,26% dimana realisasi sebesar 100% dari target 95%.
3. Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan capaian 106,38% dimana realisasi sebesar 1 dari target 0,94.
4. Indikator nilai kinerja anggaran dengan capaian 104,75% dimana realisasi sebesar 91.13 dari target 87.
5. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan capaian 77,40% dimana realisasi sebesar 65,79 dari target 85.
6. Indikator nilai kinerja implementasi WBK satker dengan capaian 102,50% dimana realisasi sebesar 82,00 dari target 80.
7. Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan capaian 138,39% dimana realisasi sebesar 110,71% dari target 80%.
8. Persentase realisasi anggaran dengan capaian 42,64% dimana realisasi sebesar 40,93% dari target 96%.

Pada Semester I tahun 2025 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang belum seluruh indikator kinerja kegiatan yang diperjanjikan terutama pada indikator yang bersifat kumulatif seperti indikator keempat yaitu Nilai Kinerja Anggaran dan indikator kedelapan yaitu Persentase Realisasi Anggaran. Rata-rata capaian pada Semester I Tahun 2025 sebesar 97,20% yang mana masih berada di bawah rata-rata capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 107,54%. Realisasi anggaran sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebesar 40,93% atau sebesar Rp.6.697.137.773,- dari total pagu pada sebesar Rp.16.362.965.000,- namun pada tahun 2025 terdapat revisi efisiensi dengan pagu blokir BKK Kelas I Padang tahun 2025 sebesar Rp.2.429.318.000,-.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dalam mencapai target tersebut seperti adanya arahan efisiensi dari presiden yang membuat beberapa kegiatan tertunda dan rencana penarikan dana juga mengalami banyak perubahan sehingga BKK Kelas I Padang kembali menyusun prioritas kegiatan dan menyesuaikan kembali rencana penarikan dana. Selain itu permasalahan eksternal seperti maraknya ICV palsu serta masih kurang kooperatifnya beberapa fasyankes yang berada di wilker BKK Kelas I Padang sehingga dilakukan sosialisasi kepada lintas sektor dan lintas program terkait untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	viii
A. LATAR BELAKANG	12
B. ISU STRATEGIS.....	13
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	15
D. STRUKTUR ORGANISASI	16
E. SUMBER DAYA.....	17
F. MAKSUD DAN TUJUAN.....	22
G. SISTEMATIKA PENULISAN	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	23
A. PERENCANAAN KINERJA.....	23
B. PERJANJIAN KINERJA	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	30
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	32
INDIKATOR PERTAMA	32
INDIKATOR KEDUA	49
INDIKATOR KETIGA.....	60
INDIKATOR KEEMPAT.....	77
INDIKATOR KELIMA.....	84
INDIKATOR KEENAM.....	90
INDIKATOR KETUJUH	97
INDIKATOR KEDELAPAN	102
C. REALISASI ANGGARAN	108
BAB IV PENUTUP.....	114
A. KESIMPULAN.....	114
B. RENCANA TINDAK LANJUT.....	116
PUSTAKA ACUAN.....	118
LAMPIRAN	119

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKK Kelas I Padang.....	16

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Tabel 1.1	Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang berdasarkan jabatan Bulan Juni Tahun 2025	18
2.	Tabel 1.2	Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang berdasarkan pangkat dan golongan Bulan Juni Tahun 2025.....	19
3.	Tabel 1.3	Distribusi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2025	22
4.	Tabel 2.1	Matrik Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2025	26
5.	Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2025.....	28
6.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
7.	Tabel 3.1	Target dan Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2025.....	31
8.	Tabel 3.2	Realisasi Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan BKK Kelas I Padang Tahun 2025.....	36
9.	Tabel 3.3	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara / PLBDN Tahun 2025.....	37
10.	Tabel 3.4	Konversi Nilai Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN Tahun 2025	38
11.	Tabel 3.5	Persentase Orang yang Diperiksa Sesuai Standar Tahun 2020 s.d. Tahun 2025	38
12.	Tabel 3.6	Persentase Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Tahun 2020 s.d. Tahun 2025.....	39
13.	Tabel 3.7	Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar Tahun 2020 s.d Tahun 2025	40
14.	Tabel 3.8	Persentase Lingkungan yang Diperiksa Sesuai Standar Tahun 2020 s.d Tahun 2025.....	40
15.	Tabel 3.9	Faktor Risiko pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan yang ditemukan dan dikendalikan Tahun 2025	51
16.	Tabel 3.10	Faktor Risiko Pada Orang Tahun 2025.....	55
17.	Tabel 3.11	Faktor Risiko Pada Alat Angkut Tahun 2025	55
18.	Tabel 3.12	Faktor Risiko Pada Lingkungan Tahun 2025	56
19.	Tabel 3.13	Target dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara Tahun 2025.....	62

20. Tabel 3.15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025.....	78
21. Tabel 3.16	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.. ..	79
22. Tabel 3.17	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 ...	85
23. Tabel 3.18	Hasil Review Kinerja Implementasi WBK Tahun 2025	91
24. Tabel 3.19	Capaian Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2025	97
25. Tabel 3.20	Nilai Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025.. ..	103
26. Tabel 3.21	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025	108
27. Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2025.....	109
28. Tabel 3.23	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output Tahun 2025	110
29. Tabel 3.24	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025..	113

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Grafik 1.1 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang Berdasarkan Status Kepegawaian Bulan Juni Tahun 2025	17
2. Grafik 1.2 Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan Bulan Juni Tahun 2025	17
3. Grafik 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tim Kerja Bulan Juni Tahun 2025	20
4. Grafik 1.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tempat Tugas Bulan Juni Tahun 2025	20
5. Grafik 1.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Bulan Juni Tahun 2025	21
6. Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN Semester I Tahun 2025	36
7. Grafik 3.2 Perbandingan Persentase Orang yang Diperiksa sesuai Standar Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2025.....	39
8. Grafik 3.3 Perbandingan Persentase Alat Angkut yang Diperiksa sesuai Standar Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025	39
9. Grafik 3.4 Perbandingan Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025.....	40
10. Grafik 3.5 Perbandingan Persentase Lingkungan yang Diperiksa sesuai Standar Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025	41
11. Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Target Jangka Menengah RAK Tahun 2020-2025	42
12. Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Satuan Kerja Setara Semester I Tahun 2025	42
13. Grafik 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Semester I Tahun 2025.....	52

14. Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2020 s/d Semester I 2025.....	52
15. Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2025)	53
16. Grafik 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Target Nasional	53
17. Grafik 3.12 Perbandingan Capaian Target Kinerja Indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Organisasi yang sejenis/setara	54
18. Grafik 3.13 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN Semester I Tahun 2025	63
19. Grafik 3.14 Perbandingan Respon SKD, KLB dan Bencana Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025	64
20. Grafik 3.15 Perbandingan Capaian Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1 Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025	65
21. Grafik 3.16 Perbandingan Capaian Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (< 1) Tahun 2020 s/d Semester I 2025	66
22. Grafik 3.17 Perbandingan Capaian Pesentase bandara/Pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2 Tahun 2020 s/d Semester I 2025	66
23. Grafik 3.18 Perbandingan Capaian Persentase bandara/Pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 Tahun 2020 s/d Semester I 2025	67
24. Grafik 3.19 Perbandingan Capaian Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0 Tahun 2020 s/d Semester I Tahun 2025.....	67
25. Grafik 3.20 Perbandingan capaian persentase bandara/Pelabuhan dengan HI buffer < 1 Tahun 2020 s/d Semester I Tahun 2025.....	68
26. Grafik 3.21 Perbandingan Capaian persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025	68

27. Grafik 3.22 Perbandingan Capaian Pesentase lokus TPM laik Hygien Tahun 2020 s.d Semester I 2025.....	69
28. Grafik 3.23 Perbandingan Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat Kesehatan Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025.....	70
29. Grafik 3.24 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah RAK 2020-2025	71
30. Grafik 3.25 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN Tahun 2025 dengan Organisasi Sejenis.....	72
31. Grafik 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2025	79
32. Grafik 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025.....	80
33. Grafik 3.28 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2025 dengan RAK Tahun 2020-2025	80
34. Grafik 3.29 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2025 dengan Standar Nasional	81
35. Grafik 3.30 Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2025 dengan Organisasi Sejenis	81
36. Grafik 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025	86
37. Grafik 3.32 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025.....	86
38. Grafik 3.33 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Dengan RAK Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025	87
39. Grafik 3.34 Perbandingan Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025 Dengan Organisasi Sejenis.....	87
40. Grafik 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Semester I Tahun 2025.....	92
41. Grafik 3.36 Pebandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025	92

42. Grafik 3.37 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2025 dengan RAK Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025	93
43. Grafik 3.38 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Semester I Tahun 2025 Dengan Organisasi Sejenis	94
44. Grafik 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Semester I Tahun 2025.....	98
45. Grafik 3.40 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025	98
46. Grafik 3.41 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2025 dengan RAK Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025	99
47. Grafik 3.42 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya antara BKK Kelas I Padang dengan Organisasi Sejenis.....	99
48. Grafik 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2025.....	103
49. Grafik 3.44 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025.....	104
50. Grafik 3.45 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan RAK Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025	104
51. Grafik 3.46 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran antara BKK Kelas I Padang dengan Organisasi Sejenis	105
52. Grafik 3.47 Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2020- Semester I 2025	108
53. Grafik 3.48 Persentase Realisasi Anggaran tahun 2020- Semester I 2025	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi pengukuran kinerja dan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Tahun 2025-2029, khususnya target kinerja tahun 2024.

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Padang (BKK) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit yang bertugas untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah melalui bandara / pelabuhan / PLBDN.

International Health Regulation (IHR) 2005 mengamanatkan kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan, memperkuat dan mempertahankan kapasitas kesehatan masyarakat nasional, agar dapat mendeteksi, menilai, melaporkan berbagai peristiwa dan melakukan respon dengan cepat dan efektif terhadap berbagai risiko dan emergensi kesehatan masyarakat. Selain itu setiap negara mempunyai kemampuan untuk mencegah dan menangkal transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan serta meresahkan dunia (PHEIC).

Negara-negara anggota juga harus melakukan penyesuaian legal dan administrasi untuk memfasilitasi kepatutan terhadap IHR 2005.

Pelabuhan dan bandara merupakan salah satu titik simpul pertemuan atau aktivitas keluar masuk alat angkut, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (*new emerging diseases*), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (*re-emerging diseases*). Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negatif dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, sosial budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I memiliki 6 (enam) wilayah kerja yaitu pelabuhan yaitu Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Bungus, Pelabuhan Sikakap, Pelabuhan Muara Padang, Pelabuhan Tuapejat dan Bandara Internasional Minangkabau. Dimana Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Bungus dan Bandara Internasional Minangkabau merupakan pelabuhan dan bandara internasional.

Disamping itu Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Bungus melakukan kegiatan ekspor impor dari dan ke luar wilayah kerja BKK Kelas I Padang sehingga memiliki resiko terjadinya penyebaran penyakit. Pelabuhan dan bandara merupakan lokasi yang memiliki aktivitas tinggi pergerakan alat angkut, muatan maupun orang. Tingginya mobilitas ini, dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat.

B. ISU STRATEGIS

Setelah berhasil dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dengan sinergi antara pemerintah dan Masyarakat mengingatkan bahwa pentingnya membangun sistem ketahanan nasional. Pasca pandemi, fokus Kementerian Kesehatan beralih ke peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui rancangan enam pilar transformasi sistem kesehatan nasional guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Namun, harus ada kesadaran menyeluruh, bahwa enam pilar transformasi kesehatan dapat ditegakkan untuk perubahan yang lebih baik apabila ada kolaborasi yang erat dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Upaya dalam mencapai transformasi Kesehatan salah satunya dengan memprioritaskan pada Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dalam sistem ketahanan nasional. Banyak tantangan dan butuh kesiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ini, salah satunya yaitu bagaimana kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi penyakit infeksi emerging dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam melaksanakan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB.

Pelaksanaan sistem kewaspadaan dini dan respon menjadi salah satu upaya penanggulangan untuk pencegahan terhadap suatu penyakit dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi munculnya penyakit potensial KLB/wabah/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, termasuk emerging, re-emerging dan new-emerging disease

Salah satu emerging disease yang menjadi perhatian adalah Mpox atau cacar monyet. Penyakit ini menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti air liur, darah, dan droplet. Petugas karantina di pelabuhan dan bandara bertugas untuk mengawasi dan mendeteksi dini kasus Mpox. Bentuk kesiapsiagaan terhadap penanganan kasus Mpox adalah dengan melaksanakan penilaian risiko cepat (Rapid Risk Assessment) sebagai bagian dari rencana strategi pengendalian kasus Mpox di Indonesia. Selain itu, Pencegahan Mpox di pelabuhan dan bandara dilakukan dengan memasang thermal scanner dan meningkatkan pengawasan visual.

Pada pengawasan lalu lintas orang, peningkatan jumlah jemaah umroh berdampak pada peningkatan pelayanan vaksinasi internasional. BKK Kelas I Padang melayani vaksinasi meningitis untuk pelaku perjalanan luar negeri yang akan berkunjung ke negara Arab Saudi, termasuk para jemaah umroh dan haji.. Selain vaksinasi meningitis BKK Kelas I Padang juga melayani vaksinasi Yellow Fever dan Vasinasi Influenza.

Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan masih menjadi isu kesehatan yang harus dilakukan upaya peningkatan. Faktor risiko kesehatan lingkungan baik dari segi fisik, kimia dan biologis masih menjadi bagian yang berpengaruh dalam status kesehatan. Dengan adanya amanat dan target dalam SDGs goals 6.1 bahwa mencapai 100% akses air minum aman maka kualitas air minum yang aman harus menjadi hal yang penting dan harus dijamin kualitasnya. Berdasarkan hal tersebut maka sesuai Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kesgiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Sektor Kesehatan mengamanatkan bahwa salah satunya Tempat Pengolahan Pangan harus memenuhi standar laik dalam keadaan memenuhi syarat serta terbebas dari faktor risiko penularan penyakit dengan adanya label pengawasan dan SLHS.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar dan masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BKK Kelas I Padang diantaranya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, baraong, dan/atau lingkungan;
3. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. pelaksanaan pelayanan Kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT BKK.

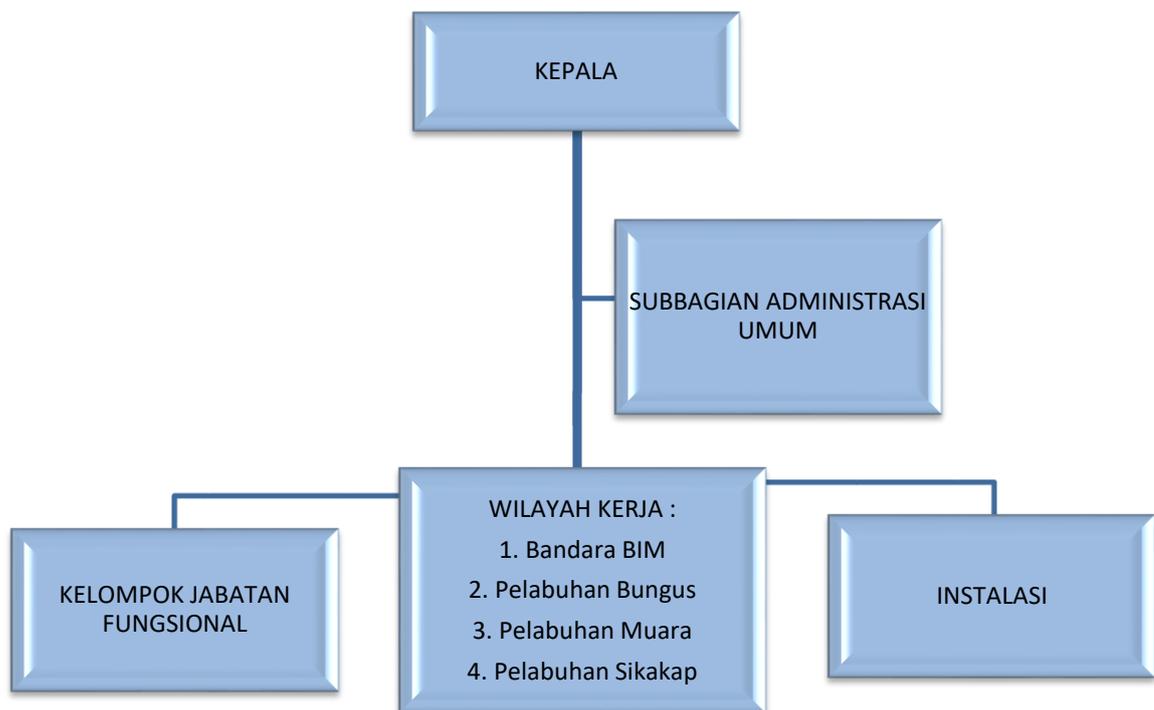
Sebelas fungsi diatas terdapat dalam indikator kinerja kegiatan BKK Kelas I Padang yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 94%, sehingga dapat mencapai tujuan BKK Kelas I Padang yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tatakerja BKK Kelas I Padang mengacu pada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan.

Struktur organisasi BKK Kelas I Padang tersebut dapat dilihat berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BKK Kelas I Padang



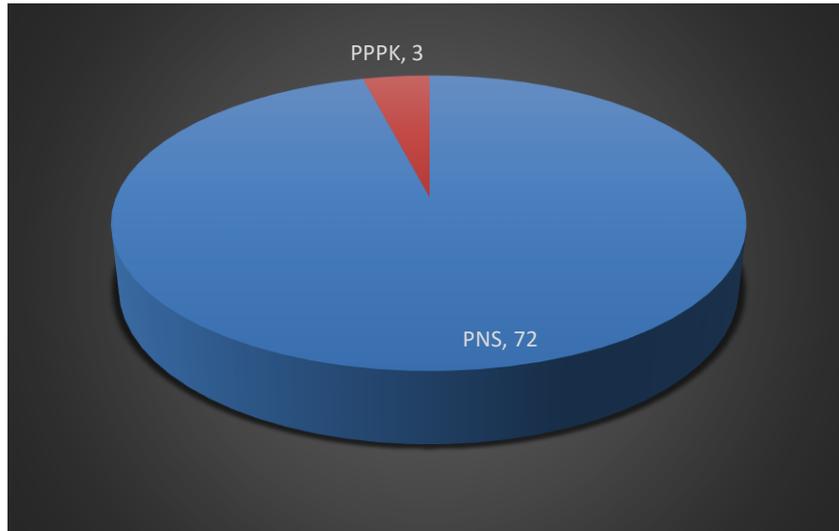
E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 30 Juni 2025 jumlah pegawai BKK Kelas I Padang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

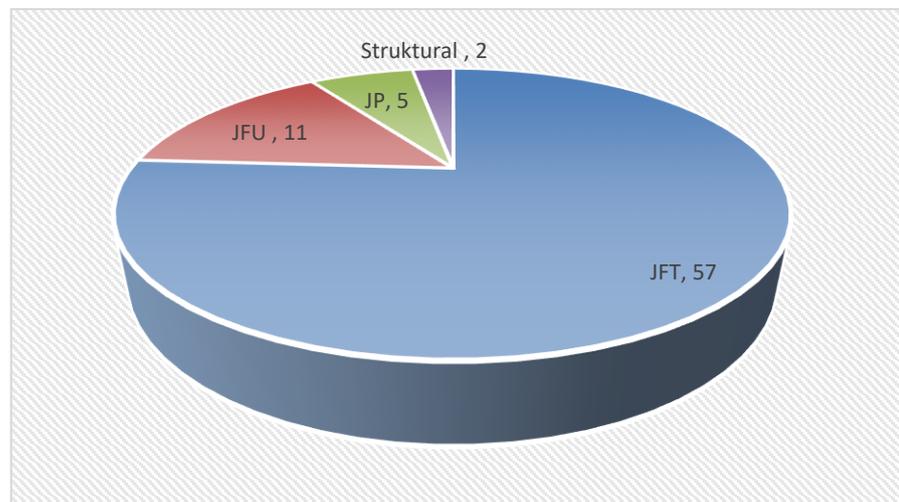
Grafik 1.1
Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang
Berdasarkan Status Kepegawaian Bulan Juni Tahun 2025



Pada bulan Juni tahun 2025 jumlah PNS di BKK Kelas I Padang yang sebanyak 72 orang (96%) dan PPPK 3 (tiga) orang (4%).

b. Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

Grafik 1.2
Distribusi Pegawai ASN BKK Kelas I Padang
Berdasarkan Jabatan Bulan Juni Tahun 2025



Pada bulan Juni tahun 2025 jumlah pegawai BKK Kelas I Padang sebagian besar adalah jabatan fungsional teknis yaitu sebanyak 57 orang (76%), 11 orang (14,66%) dengan jabatan fungsional umum, 5 orang (6.67%) dengan jabatan pelaksana sedangkan jabatan struktural sebanyak 2 orang (2,67%).

1. Tabel 1.1 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang Berdasarkan Jabatan Bulan Juni Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Grade	Jumlah
1	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang	13	1
2	Dokter Ahli Madya	12	3
3	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	11	1
4	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11	2
5	Perawat Ahli Madya	11	1
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	1
7	Dokter Ahli Muda	10	3
8	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	1
9	Dokter Ahli Pertama	9	2
10	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	5
11	Perawat Ahli Muda	9	1
12	Sanitarian Ahli Muda	9	1
13	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	8	3
14	Sanitarian Penyelia	8	1
15	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	4
16	Perawat Ahli Pertama	8	1
17	Perawat Penyelia	8	3
18	Perencana Ahli Pertama	8	2
19	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	2
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1
21	Sanitarian Ahli Pertama	8	3
22	Sanitarian Penyelia	8	1
23	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	1
24	Entomolog Kesehatan Mahir	7	0
25	Epidemiolog Kesehatan Mahir	7	1
26	Perawat Ahli	7	1
27	Perawat Mahir	7	5
28	Sanitarian Mahir	7	2
29	Perawat Terampil	6	3
30	Arsiparis Terampil	6	2
31	Entomolog Kesehatan Terampil	6	2
32	Epidemiolog Kesehatan Terampil	6	4
33	Pengadministrasi Keuangan / Pengelola Keuangan	6	1
34	Pengelola Barang Milik Negara	6	1

No	Nama Jabatan	Grade	Jumlah
35	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	1
36	Arsiparis / Pranata Kearsipan	5	1
37	Entomolog Kesehatan / Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	5	2
38	Perawat / Pengelola Keperawatan	5	3
39	Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan	5	1
40	Petugas Keamanan	5	1
Total			75

c. Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

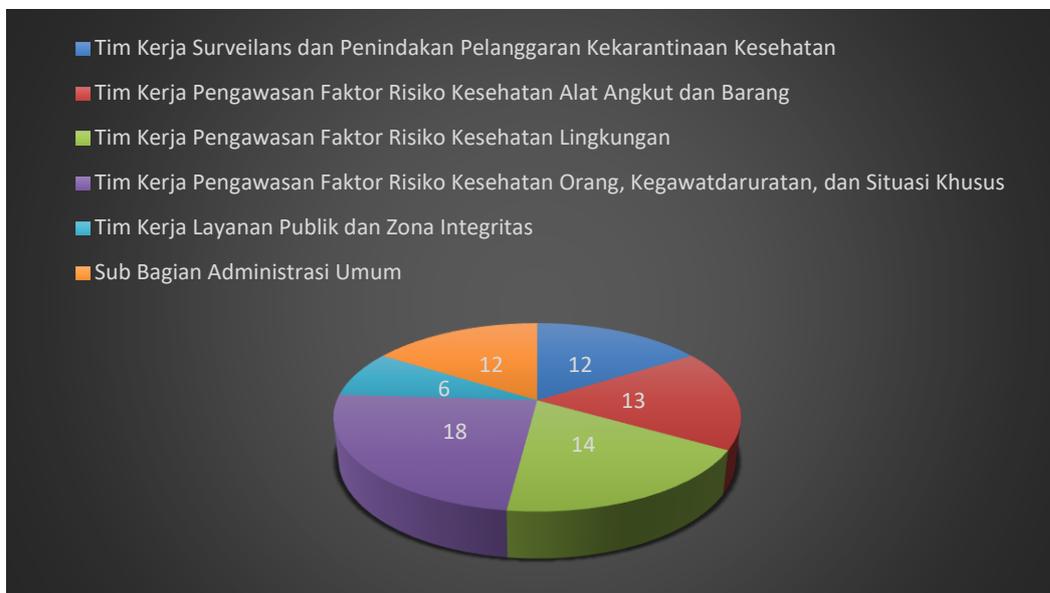
2. Tabel 1.2 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang Berdasarkan Pangkat dan Golongan Bulan Juni Tahun 2025

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV/b	2	2.67
2	IV/a	8	10.67
3	III/d	11	14.67
4	III/c	10	13.33
5	III/b	17	22.67
6	III/a	12	16.00
7	II/d	2	2.67
8	II/c	9	12.00
9	I/c	1	1.33
10	IX	1	1.33
11	VII	2	2.67
Jumlah		75	100%

Dari tabel tersebut diketahui, bahwa pegawai BKK Kelas I Padang paling banyak berpangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b, yaitu sebanyak 17 orang (22,67%), kemudian golongan Penata Muda III/a sebanyak 12 orang (16,00%) dan paling sedikit adalah dengan golongan I/c dan IX masing-masing 1 orang (1,33%).

d. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tim Kerja

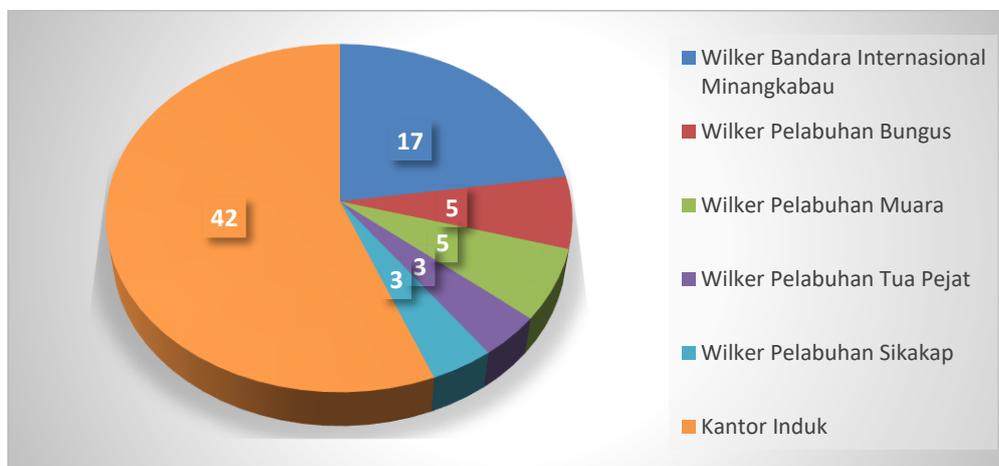
1. Grafik 1.3 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang Berdasarkan Tim Kerja Bulan Juni 2025



Dari grafik tersebut dapat diketahui, bahwa pegawai BKK Kelas I Padang bulan Juni tahun 2025, paling banyak terdapat pada tim kerja Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus, yaitu sebanyak 18 orang (24%) dan paling sedikit pegawai pada Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas yaitu sebanyak 6 orang (8%).

e. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas

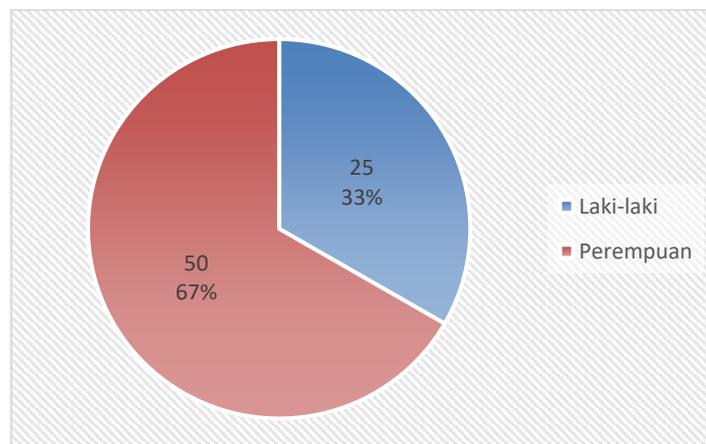
2. Grafik 1.4 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang Berdasarkan Tempat Tugas Tahun 2024



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pegawai BKK Kelas I Padang bulan Juni tahun 2025 paling banyak bertugas di Kantor Induk yaitu sebesar 56% atau sejumlah 42 orang dan paling sedikit terdapat di Wilker Sikakap dan Tua Pejabat yaitu sebanyak 3 orang (4%).

f. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 1.5
Distribusi Pegawai BKK Kelas I Padang
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Dari grafik 1.5 dapat diketahui bahwa pegawai perempuan BKK Kelas I Padang bulan Juni tahun 2025 lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki yaitu sebesar 67% atau sebanyak 50 orang sedangkan pegawai laki-laki sebesar 33% atau sebanyak 25 orang.

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam mencapai kinerjanya, BKK Kelas I Padang didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun 2025 pagu anggaran BKK Kelas I Padang sebesar Rp.16.362.965.000,-. Sampai dengan Semester I Tahun 2025 DIPA BKK Kelas I Padang mengalami 3 (tiga) kali revisi dengan tema revisi diantaranya Revisi Efisiensi dan Revisi Halaman III DIPA.

Adapun sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber Dana Anggaran ini dibagi sebagai berikut:

Tabel 1.3
Distribusi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Di BKK Kelas I Padang Tahun 2024

Sumber Dana	Pagu Anggaran
Rupiah Murni	Rp. 15.978.198.000,-
PNBP	Rp. 384.767.000,-
Jumlah	Rp. 16.362.965.000,-

F. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKK Kelas I Padang Semester I Tahun 2025 adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada unit utama Ditjen P2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKK Kelas I Padang untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2025 terdiri dari :

- Bab I (Pendahuluan)
Menjelaskan latar belakang, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, SDM, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)
Menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan, serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2025.
- Bab III (Akuntabilitas Kinerja)
Menjelaskan pengukuran kinerja, capaian kinerja Semester I tahun 2025, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumber daya lain yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja
- Bab IV (Penutup)
Berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut tahun mendatang.
- Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja BKK Kelas I Padang Tahun 2025, telah disusun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Perencanaan Kinerja juga memuat perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/ unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani sebagai suatu tanda kesanggupan Kepala BKK Kelas I Padang untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025 - 2029

Periode tahun 2025-2029 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis dengan didukung terlaksananya Rencana Strategis, Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025 – 2029 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen Bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan melalui Kementerian Kesehatan melalui program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Dalam upaya mencapai misi tersebut perlu ditetapkan Sasaran Strategis agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat jelas dan terukur serta berorientasi hasil atau menghasilkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

RAK BKK Kelas I Padang 2025–2029 diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran program Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan. Pada Tahun 2025 - 2029 BKK Kelas I Padang tidak ada visi dan misi unit kerja, namun BKK Kelas I Padang mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu:

a. Visi

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

b. Misi

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM)

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
6. Membangun dari desa dan dari bawah
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya

BKK Kelas I Padang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Penanggulanga Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui indikator-indikator kinerja yang relevan dengan RAP dan Renstra Kemenkes.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh BKK Kelas I Padang pada periode tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaaan di pintu masuk negara dan wilayah.

d. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh BKK Kelas I Padang pada periode tahun 2025-2029 adalah meningkatnya pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%.

e. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Aksi Kerja pada periode 2025 – 2029 masih dalam proses penyusunan menunggu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, sehingga target indikator yang ada saat ini hanya pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang

No	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,95					Tim kerja 1, 2, 3 dan 4
2	Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	95%					Tim kerja 1, 2, 3 dan 4
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,95					Tim kerja 1, 2, 3 dan 4
4	Nilai kinerja anggaran	80					Subbag Adum
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	91					Subbag Adum
6	Kinerja implementasi WBK satker	80					Timker 5 dan Subbag Adum
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%					Subbag Adum
8	Persentase realisasi anggaran	96%					Subbag Adum

2. Rencana Kinerja Tahunan

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan yang merupakan proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukannya menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan RAK juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih

operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RAK yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RAK. Oleh karena itu, tim kerja dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja. Hasil dari proses ini adalah Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja, BKK Kelas I Padang tahun 2024, telah disusun Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Pada Tahun 2025 BKK Kelas I Padang memiliki 2 (dua) program yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Program Dukungan Manajemen. Adapun uraian program dan Rincian Output BKK Kelas I Padang tahun 2025 dapat dilihat dengan tabel berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan BKK Kelas I Padang

Kode	Rincian Output	2025		
		Volume	Satuan	Anggaran
4249	Duk. Pelayanan Kekeantinaan di Pnt Msk Negara & Wilayah			2,758,281,000
PEA001	Koordinasi Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	21	Kegiatan	62,142,000
QAA012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	14	Orang	19,330,000
QAH016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	7	Layanan	86,186,000
QAH017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	55	Layanan	107,874,000
QAHU01	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan	270	Layanan	178,200,000
QAHU04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	206	Layanan	329,600,000

Kode	Rincian Output	2025		
		Volume	Satuan	Anggaran
QAHU07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	30	Layanan	36,780,000
QAHU08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	56	Layanan	164,136,000
QAHU09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	18	Layanan	8,676,000
QAHU10	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	4	Layanan	5,448,000
QAHU11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	240	Layanan	86,400,000
QAHU12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	40	Layanan	68,800,000
QAHU13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	36	Layanan	19,080,000
QAHU14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	30	Layanan	39,420,000
QAHU15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	8	Layanan	43,640,000
QAHU19	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan	90	Layanan	59,400,000
QAHU21	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria katagori 2	4	Layanan	6,880,000
QAHU22	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD katagori II	8	Layanan	2,880,000
QAHU25	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I	17	Layanan	312,800,000
QAHU28	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori I	17	Layanan	285,600,000
RAB001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk	13	Paket	773,342,000
TBC001	Pelatihan kesehatan	12	Orang	61,667,000
4815	Dukma Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			13,604,684,000
EBA956	Layanan BMN	2	Layanan	20,000,000
EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat	3	Layanan	11,300,000
EBA962	Layanan Umum	5	Layanan	34,582,000
EBA963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	150,000
EBA994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	13,145,263,000
EBC954	Layanan Manajemen SDM	1	Orang	6,802,000
EBC996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	15,780,000
EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9	Dokumen	141,496,000
EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9	Dokumen	84,332,000
EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	8	Dokumen	104,904,000
EBD961	Layanan Reformasi Kinerja	3	Dokumen	15,236,000
EBD974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	7	Dokumen	24,839,000
Total				16,362,965,000

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja BKK Kelas I Padang Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1 Indeks deteksi faktor risiko di bandara / pelabuhan / PBLDN	0,95
		2 Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	95%
		3 Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,94
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4 Nilai kinerja anggaran	85
		5 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	91
		6 Kinerja implementasi WBK satker	80
		7 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%
		8 Persentase Realisasi Anggaran	96%

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 BKK Kelas I Padang di alokasikan anggaran sebesar Rp.16.362.965.000,- (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya.

Manfaat pengukuran kinerja adalah untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang tingkat capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan Penetapan Kinerja. Capaian kinerja ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Target dan Capaian Indikator Kegiatan
BKK Kelas I Padang Semester I Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks deteksi faktor risiko di bandara / pelabuhan / PBLDN	0,95	0,94	98,95%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	95%	100%	105,26%
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,94	1,00	106,38%
4	Nilai kinerja anggaran	85	65,79	77,40%
5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	91	96,50	106,04%
6	Kinerja implementasi WBK satker	80	82,00	102,50%
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	110,71%	138,39%
8	Persentase Realisasi Anggaran	96%	40,93%	42,64%

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada Semester I tahun 2025 terlihat dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ada di BKK Kelas I Padang terdapat 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yang telah mencapai target dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang masih belum mencapai target yang ditentukan dengan rata-rata capaian sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar 97,20%.

Untuk lebih jelasnya terkait hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan per sasaran strategis kegiatan mulai dari definisi operasional, rumus / cara perhitungan, capaian indikator (Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target RAK sampai dengan Tahun 2025, Perbandingan Capaian Kinerja dengan 3 tiga Satuan Kerja Lain sejenis, Perbandingan Capaian Kinerja Secara Nasional), upaya yang dilakukan untuk menetapkan indikator, analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan, kendala/ masalah yang dihadapi, pemecahan masalah, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang Menunjang Tingkat Keberhasilan / kegagalan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

INDIKATOR PERTAMA

Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN

Pelabuhan laut dan udara sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit juga merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit *new emerging diseases* dan *re-emerging diseases* yang memiliki implikasi besar dan faktor risiko besar dan potensial dalam penyebaran penyakit.

Kegiatan deteksi dini faktor risiko di pintu masuk Negara merupakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko di pelabuhan atau bandara, berupa pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit serta meminimalisasikan dampak resiko penularan penyakit dan lingkungan terhadap masyarakat, sehingga tupoksi BKK dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Pengertian

Indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN adalah pengukuran kinerja seluruh rangkaian pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang ada di Pelabuhan / Bandara / PLBDN dalam wilayah kerja BKK Kelas I Padang selama Semester I Tahun 2025. Data ini diperoleh dari pengukuran 4 parameter, yaitu :

A. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar

Pemeriksaan orang dilakukan terhadap seluruh pelaku perjalanan yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan di seluruh pelabuhan, bandara, dan kantor yang meliputi wilayah kerja BKK Kelas I Padang. Pemeriksaan orang ini berupa :

1) Pemeriksaan dan pengawasan suhu tubuh penumpang, crew pesawat dan Anak Buah Kapal (ABK)

Pemeriksaan suhu tubuh pada penumpang, crew pesawat dan Anak Buah Kapal (ABK) dilakukan dalam rangka pengawasan tanda dan gejala para pelaku perjalanan yang datang dari dan ke wilayah terjangkit. Apabila terdapat pelaku perjalanan yang terdeteksi dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ maka dilakukan *Risk Assesment* atau Penelusuran Epidemiologi (PE) untuk

mendapatkan kesimpulan dari hasil wawancara apakah pelaku perjalanan tersebut beresiko atau tidak.

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian terhadap kasus penyakit yang berpotensi wabah, Kementerian Kesehatan Direktur Jendral P2P menerbitkan Surat Edaran Adanya Nomor:HK.02.02/C/2160/2024 tentang Peningkatan kewaspadaan terhadap MPOX dipintu masuk, Pelabuhan dan Bandar udara yang melayani lalu lintas domestic dan di wilayah.

2) Pemeriksaan Rapid Test Covid-19

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19, BKK Kelas I Padang melakukan pemeriksaan rapid test antibody pada pelaku perjalanan yang menunjukkan gejala dan / atau bersiko tinggi pada anak buah kapal yang belum membawa dokumen hasil PCR negatif. Pemeriksaan ini juga dilakukan pada jamaah haji Debarkasi Padang, pasien berobat dan pemeriksaan pengujian Kesehatan di Klinik BKK Kelas I Padang. Pemeriksaan rapid test antibody ini dilakukan dalam upaya skrining cegah tangkal masuknya Covid-19 di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.

3) Skrining penyakit menular langsung

Skrining penyakit menular langsung yang dilakukan BKK Kelas I Padang pada Tahun 2024 adalah HIV/AIDS dan TBC. Skrining ini merupakan pemeriksaan terhadap orang – orang yang tidak memiliki gejala ataupun keluhan untuk mengklasifikasikan mereka ke dalam kategori yang diperkirakan mengidap atau tidak mengidap penyakit.

4) Pemeriksaan vaksinasi

Sebelum dilakukan vaksinasi, setiap orang dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Pemeriksaan ini meliputi Tanda Tanda Vital (TTV), keadaan umum, riwayat alergi dan Riwayat penyakit yang diderita. Sehingga dari hasil pemeriksaan ini dapat disimpulkan apakah layak untuk divaksin atau tidak.

5) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan

Pemeriksaan orang ini dilakukan pada setiap permohonan pasien yang berkunjung ke BKK Kelas I Padang, yang kemudian diterbitkan dokumen kesehatan seperti surat laik terbang, izin angkut orang sakit dan surat keterangan kesehatan.

B. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar

Data pemeriksaan alat angkut berupa :

1) Jumlah *Certificate of Pratique* (COP)

Certificate of Pratique (COP) adalah sertifikat izin bebas karantina yang diberikan kepada alat angkut (kapal) yang datang dari luar negeri dan/ atau wilayah terjangkau. Sebelumnya kapal yang datang dari wilayah terjangkau diperiksa dahulu oleh pejabat karantina di Quarantine Area. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinilai tidak terdapat masalah atau faktor risiko penyakit karantina, maka diterbitkanlah COP ini.

2) Jumlah *Public Health Quarantine Clearance* (PHQC)

Public Health Quarantine Clearance (PHQC) adalah surat persetujuan berlayar karantina kesehatan. Kapal hanya dapat berangkat setelah dinyatakan lengkap dokumennya dan pada saat pemeriksaan oleh pejabat karantina kesehatan BKK Kelas I Padang dan tidak ditemukan indikasi faktor risiko kesehatan masyarakat.

3) Jumlah *General Declaration* (GENDEC) terverifikasi

General Declaration (GENDEC) terverifikasi adalah GENDEC yang dilaporkan oleh pilot pesawat sudah sesuai dengan hasil pengawasan kekarantinaan kesehatan di bandara kedatangan.

C. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar

Pemeriksaan barang dilakukan terhadap jenazah yang akan diangkut. prosedur pengawasan pengangkutan jenazah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomo 424 tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan, antara lain jenazah harus disuntik dengan obat penahan busuk secukupnya, jenazah harus dimasukkan dalam peti yang di buat dari logam dan alasnya di tutup dengan bahan yang menyerap serta peti di tutup rapat rapat dan dimasukkan kedalam peti kayu. selain itu terdapat syarat administrasi yang harus dilengkapi. serta penerbitan izin angkut jenazah. Izin angkut jenazah adalah sertifikat yang menyatakan bahwa jenazah yang akan dibawa bebas dari potensi penularan penyakit pada masyarakat. Pemeriksaan ini dilakukan di wilayah kerja pelabuhan dan bandara.

D. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

Data pemeriksaan lingkungan berupa :

1) Jumlah pemeriksaan sanitasi TTU (Tempat Tempat Umum)

Pemeriksaan sanitasi TTU berupa gedung / bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik berupa penilaian kondisi hygiene dan sanitasi Gedung / bangunan dan lingkungan. Hasil pemeriksaan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

2) Jumlah pemeriksaan sanitasi TPM (Tempat Pengolahan Makanan)

Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan menyeluruh meliputi pemeriksaan seluruh aspek sanitasi sesuai dengan Permenkes No. 14 tahun 2021 yang dinilai berdasarkan jenis TPP. Uji petik pengambilan sampel dilakukan terhadap sampel makanan, sampel usap alat makan sampel air minum yang digunakan untuk proses pengolahan.

3) Jumlah pemeriksaan ISPAB (Inspeksi Sarana Penyediaan Air Bersih)

Pemeriksaan ISPAB dilakukan di *reservoir* dan *hydrant* di pelabuhan dan bandara di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.

2. Definisi Operasional

Indeks kinerja deteksi dini faktor risiko, yang terdiri dari persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar di pelabuhan dan bandara yang ada di wilayah kerja BKK Kelas I Padang dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus / Cara Perhitungan

Bobot pengukuran kinerja dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai *score* maksimal dikurang *score* minimal). Bobot masing – masing parameter adalah :

- Persentase orang yang diperiksa sesuai standar : Bobot 5 (Mutlak)
- Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar : Bobot 5 (Mutlak)
- Persentase barang yang diperiksa sesuai standar : Bobot 3 (Perlu)
- Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar : Bobot 5 (Mutlak)

Tabel 3.2
Realisasi Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan
Semester I Tahun 2025

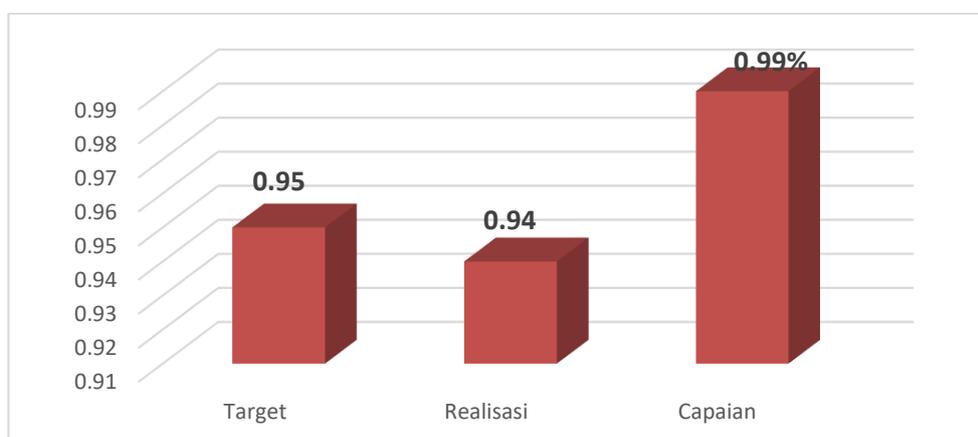
Parameter	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pemeriksaan Orang sesuai Standar	Orang	1,216,257	1,412,857	116
- Jumlah penumpang Dalam Negeri	Orang	1,068,000	1,037,781	97
- Jumlah penumpang Luar Negeri	Orang	74,772	262,082	351
- Kunjungan poliklinik bukan penumpang	Orang	120	180	150
- Jumlah pemeriksaan crew pesawat	Orang	57,767	52,177	90
- Jumlah pemeriksaan ABK	Orang	14,898	59,813	401
- Skrenning HIV/AIDS	Orang	200	225	113
- Skrenning TBC	Orang	100	100	100
- Skrenning malaria	Orang	400	499	125
Pemeriksaan Alat Angkut sesuai Standar	Pesawat / Kapal	2485	3284	132
- Gendec terverifikasi	Pesawat	360	757	210
- COP	Kapal	133	152	114
- PHQC	Kapal	1992	2375	119
Pemeriksaan Barang sesuai Standar	Barang	20	25	125
- Izin angkut jenazah	Barang	20	25	125
Pemeriksaan Lingkungan sesuai Standar	Kali	1415	1385	98
- TTU	Kali	608	571	94
- TPM	Kali	388	402	104
- ISPAB	Kali	186	194	104

4. Capaian Indikator

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Pertama dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Deteksi Dini Faktor
Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN
Semester 1 Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN pada Semester I Tahun 2025 yaitu 0,94. Berdasarkan data yang tersedia, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target pada semester 1 tahun 2025 belum sepenuhnya terpenuhi. Target yang ditetapkan sebesar 0,95% tidak tercapai, dengan realisasi capaian hanya mencapai 0,94%, sehingga terdapat selisih sebesar 0,01% dari target yang diharapkan.

Penyebab utama dari pencapaian yang belum optimal ini adalah periode pengambilan data yang belum mencakup keseluruhan semester 1. Data yang digunakan dalam perhitungan capaian hanya diambil hingga tanggal 15 Juni 2025, sementara semester 1 seharusnya berlangsung hingga akhir Juni 2025. Sementara itu, capaian indeks deteksi dini faktor di pelabuhan/ bandara/ PLBDN di BKK Kelas I Padang tahun 2024 jika dilihat dari masing – masing parameter dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.3
Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN
Semester I Tahun 2025

Parameter	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Orang yang Diperiksa sesuai Standar	1,216,257	1,412,857	116 %
Persentase Alat Angkut yang Diperiksa sesuai Standar	2485	3284	132%
Persentase Barang yang Diperiksa sesuai Standar	20	25	125%
Persentase Lingkungan yang Diperiksa sesuai Standar	1415	1385	98%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, Dari Empat parameter yang dievaluasi hanya dua parameter yang mencapai atau melampaui target standar yaitu 120%. Sementara itu parameter Orang yang diperiksa sesuai standar dan lingkungan belum mencapai 120 %. Hal ini disebabkan Data yang digunakan dalam perhitungan capaian hanya diambil hingga tanggal 15 Juni 2025, Namun, proyeksi capaian diperkirakan sampai dengan akhir juni 2025 parameter tersebut berpotensi mencapai target tersebut.

Jika dihitung dengan rumus nilai empiris dimana score maximal hanya 120%, maka capaian indeks indikator pertama ini menjadi 0,94 atau 99% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.4
Konversi Nilai Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN
Semester I Tahun 2025

No	Parameter	Bobot	Capaian	Cove- rage	Skor	Max	Cov Max	Skor Max	Min
1	2	3	4	$5 = \frac{(4/7) * 100}{100}$	$6 = 3 * 5$	7	8	$9 = 3 * 8$	10
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	116%	116	580	100	120	600	
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	120%	120	600	100	120	600	
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120%	120	360	100	120	360	
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	98%	98	490	100	120	600	
TOTAL					2.095			2.160	

Dari data diatas didapatkan nilai indeks yaitu :

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{2.030}{2.160} = 0.94$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja beberapa tahun terakhir (Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2025)

Indikator kinerja ini berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi beberapa tahun terakhir. Sehingga, untuk indikator ini hanya dapat dibandingkan dengan capaian / realisasi masing – masing parameter indikator saja.

1. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar

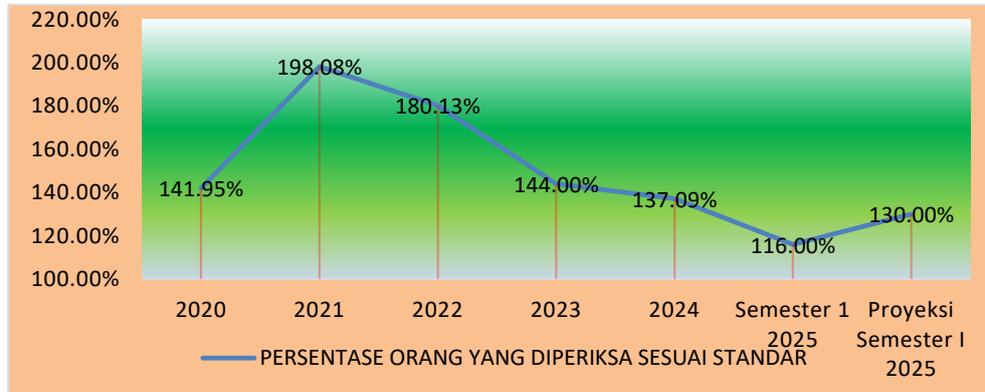
Jumlah capaian pemeriksaan orang sesuai standar dari beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Persentase Orang yang Diperiksa Sesuai Standar
Tahun 2020 s.d. Semester 1 Tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	439.900	624.458	141,95%
2021	1.000.000	1.980.871	198,08%
2022	1.200.000	2.161.604	180,13%
2023	2.091.407	3.009.440	144%
2024	2.300.477	3.153.745	137%
Smst 1 2025	1,216,257	1,412,857	116 %
Proyeksi 2025	2.484.515	3.240.500	130%

Untuk perbandingan persentase orang yang diperiksa sesuai standar dengan lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Persentase Orang yang Diperiksa sesuai Standar Tahun 2020 s.d. Semester 1 Tahun 2025



2. Persentase Alat Angkut yang Diperiksa sesuai Standar

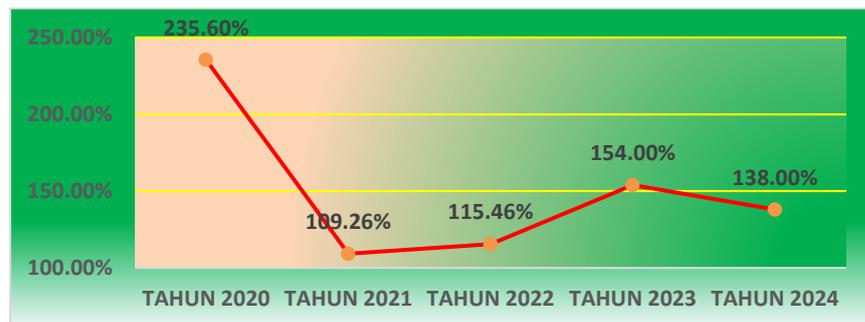
Jumlah capaian pemeriksaan alat angkut sesuai standar dari beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Persentase Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	500	1.178	235,6%
2021	5.650	6.173	109,26%
2022	5.400	6.235	115,46%
2023	4.512	6.935	154%
2024	4.945	6.818	138%
Semester I 2025	2.485	3.284	132%
Proyeksi 2025	4.950	6.670	135%

Sedangkan perbandingan persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar dengan lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.3
Perbandingan Persentase Alat Angkut yang Diperiksa sesuai Standar Tahun 2020 s.d. Semester 1 Tahun 2025



3. Persentase Barang yang Diperiksa sesuai Standar

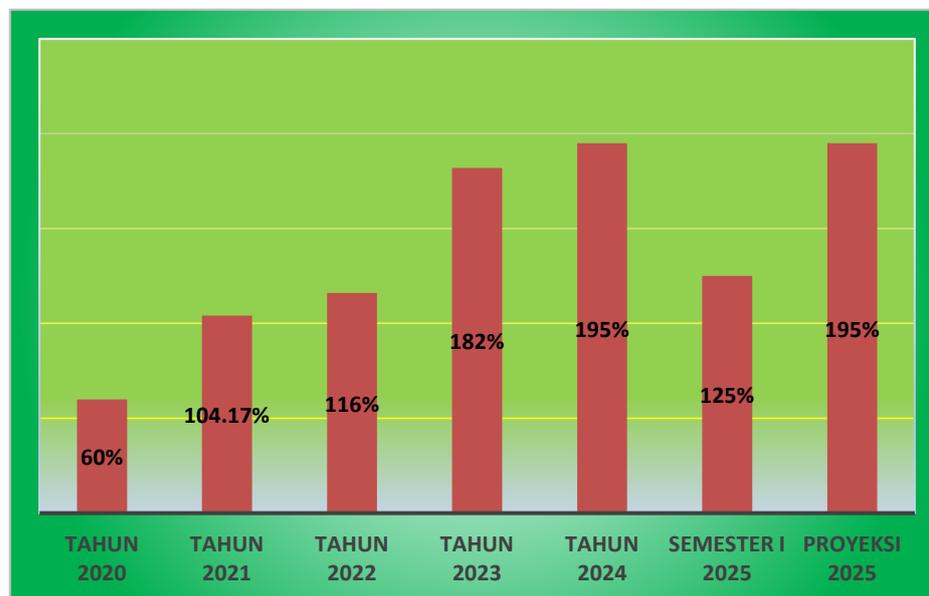
Jumlah capaian pemeriksaan barang sesuai standar dari beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar
Tahun 2020 s.d. Semester 1 Tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	5	3	60%
2021	48	50	104,17%
2022	50	58	116%
2023	38	69	182%
2024	40	78	195%
Semester 1 2025	20	25	125%
Proyeksi 2025	40	78	195%

Perbandingan persentase barang yang diperiksa sesuai standar dengan lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.4
Perbandingan Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar
Tahun 2020 s.d Semester 1 Tahun 2025



4. Persentase Lingkungan yang Diperiksa sesuai Standar

Jumlah capaian pemeriksaan lingkungan sesuai standar dari beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Persentase Lingkungan yang Diperiksa Sesuai Standar
Tahun 2020 s.d. Tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	91	91	100%
2021	1.225	1.227	100,2%
2022	1.225	1.231	100,5%
2023	1.916	1.951	102%
2024	2.073	2.222	107,187%
Semester 1 2025	1.415	1.385	98%
Proyeksi 2025	2573	2573	100%

Perbandingan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

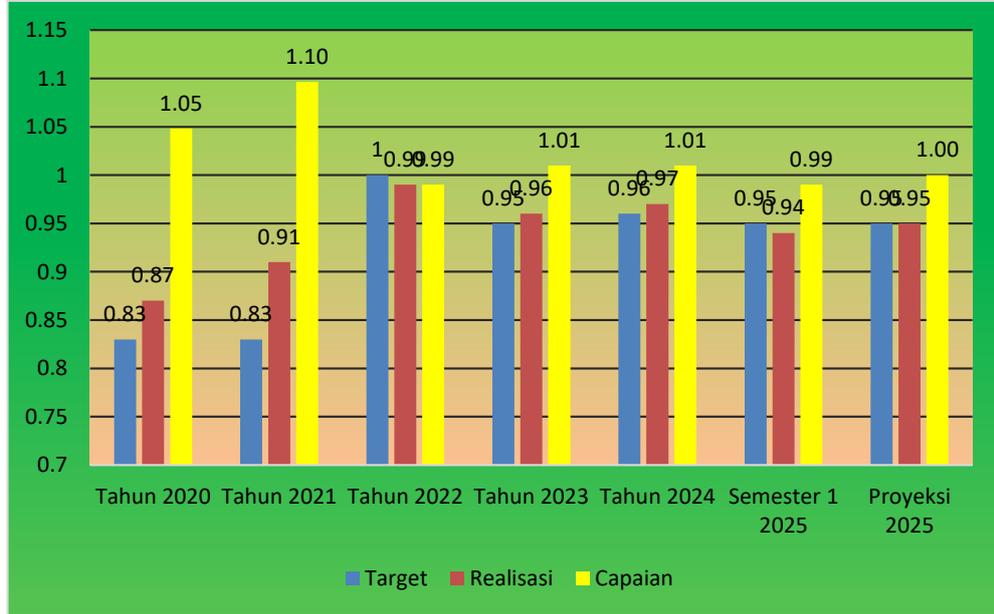
Grafik 3.5
Perbandingan Persentase Lingkungan yang Diperiksa sesuai Standar
Tahun 2020 s.d. Tahun 2025



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020 - 2025)

Capaian indikator Indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN jika dibandingkan dengan Rencana Aksi Kegiatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

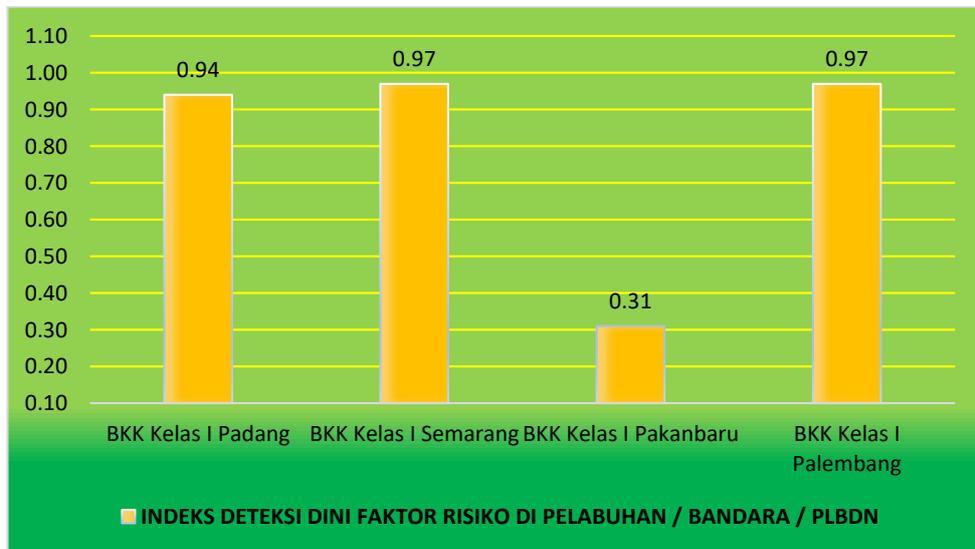
Grafik 3.6
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks deteksi dini faktor risiko di
Pelabuhan / Bandara / PLBDN Tahun 2024 dengan
Target Jangka Menengah RAK Tahun 2020-2025



d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satuan Kerja Sejenis / Setara

Sebagai pembandingan capaian indikator pertama ini, BKK Kelas I Padang melakukan perbandingan capaian dengan beberapa Satuan Kerja yang setara yaitu berada pada Kelas I dan memiliki wilayah kerja di pelabuhan dan bandara, yaitu BKK Kelas I Pekanbaru, BKK Kelas I Palembang dan BKK Kelas I Semarang. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.7
Perbandingan Capaian Indikator Pertama dengan Satuan Kerja Setara
Semester 1 Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN dengan satuan kerja yaitu BKK Kelas I Semarang dan BKK Kelas I Palembang capaian indeks deteksi dini faktor di Pelabuhan / bandara / PLBDN yang tertinggi, sedang kan BKK Kelas I Pekanbaru capaian indeks deteksi dini faktor di Pelabuhan / bandara/ PLBDN lebih rendah dibandingkan dengan BKK Kelas I Padang.

5. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN di wilayah kerja BKK Kelas I Padang tahun 2025 adalah dengan melakukan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, Kerjasama dengan lintas sektor, dan dukungan penganggaran diantaranya:

- a. Pemeriksaan Orang Sesuai Standar
 - 1) Menerapkan prosedur perjalanan orang sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
 - 2) Berkoordinasi dengan pihak maskapai dan kapal penumpang untuk menyampaikan informasi kepada para penumpang yang sakit agar melapor kepada pihak awak kabin dan wajib melaporkan kepada pihak BKK Kelas I Padang guna dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur.
 - 3) Melakukan *skinning* / penapisan dan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap pelaku perjalanan yang datang dari wilayah terjangkau.
 - 4) Melakukan pelayanan kesehatan haji di Embarkasi Padang dan Bandara Internasional Minangkabau pada musim haji Tahun 2025.
 - 5) Membuat Nota dinas himbauan peningkatan pengawasan terhadap penyakit Monkeypox kepada seluruh petugas BKK.
 - 6) Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kesehatan pada situasi khusus Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.
 - 7) Melakukan sosialisasi dan *skinning* penyakit menular langsung (HIV/ AIDS, TBC, dan malaria) kepada masyarakat di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.
 - 8) Melakukan pemeriksaan dengan cermat sesuai SOP kepada setiap sasaran vaksinasi.
 - 9) Penundaan keberangkatan bagi calon penumpang yang memiliki hasil pemeriksaan penyakit menular.

- 10) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan (surat laik terbang, izin angkut orang sakit dan sertifikat pengujian kesehatan).
- b. Pemeriksaan Alat Angkut Sesuai Standar
- 1) Berkoordinasi dengan pihak agen pelayaran dalam pelaksanaan pemeriksaan kedatangan kapal dari wilayah terjangkit.
 - 2) Melakukan rekomendasi tindakan pada kapal yang berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan memiliki faktor – faktor risiko penyakit.
 - 3) Melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang membutuhkan perpanjangan sertifikat kesehatan kapal.
 - 4) Melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang akan berangkat dari pelabuhan di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.
 - 5) Berkoordinasi dengan General Manajer PT. Garuda Indonesia Cabang BIM terkait kewajiban maskapai untuk menyerahkan Dokumen General Declaration (Gendec) kepada petugas BKK di kedatangan Jemaah Haji.
 - 6) Berkoordinasi dengan pihak maskapai dan Air Traffic Control (ATC) sehubungan dengan kewajiban maskapai untuk melaporkan keadaan di pesawat ada tidaknya penumpang berpenyakit menular potensi wabah.
- c. Pemeriksaan Barang Sesuai Standar
- Melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang akan diberangkatkan dari pelabuhan maupun bandara di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.
- d. Pemeriksaan Lingkungan Sesuai Standar
- 1) Melakukan IKL Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Inpeksi Sarana Penyediaan Air Bersih (ISPAB) sesuai lokus target pemeriksaan di semua wilayah kerja di BKK Kelas I Padang
 - 2) Melaksanakan survey vektor pes, DBD, malaria, diare sesuai dengan pelaksanaan RPD dan RPK
 - 3) Melakukan sampel air bersih dan air minum pada sumber air yang berasal dari alat angkut, reservoir, hydrant dan Depot Air Minum (DAM)
 - 4) Pelaksanaan kegiatan pada operasional Embarkasi dan Debarkasi Haji dalam rangka pemeriksaan lingkungan baik itu TTU, TPP dan Vektor

6. Analisa Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja dihitung dengan rumus nilai empiris dimana score maximal hanya 120%, maka capaian indeks indikator pertama ini menjadii 0,94 atau 94%

sedangkan target yang ditetapkan 0,95 atau 95%, jika dilihat dari masing – masing parameternya, jumlah capaian indikator ini ada 2 Parameter sudah mencapai target dan 2 parameter lagi yang belum mencapai target yang ditetapkan. Faktor penyebab keberhasilannya antara lain:

- a. Peningkatan jumlah vaksinasi di tahun 2025 dikarenakan vaksinasi meningitis meningococcus merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang datang ke Arab Saudi, menggunakan visa haji dan umrah (SE No. HK.02.02/A/3717/2024)
- b. Penambahan vaksinasi polio menjadi vaksinasi utama sebagai suatu kewajiban bagi mereka yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa haji dan umrah SE (SE No. HK.02.02/A/1206/2025)
- c. Normalisasi perjalanan orang, barang dan alat angkut baik dari dalam/luar negeri baik yang ada di wilayah pelabuhan maupun wilayah bandara.
- d. Adanya penerbangan langsung dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Bandara Jeddah bagi Jamaah Umroh yang mengakibatkan meningkatnya penerbangan luar negeri.
- e. Koordinasi yang baik dari lintas sektor dalam pemeriksaan penumpang, ABK dan awak kabin baik di wilayah bandara maupun wilayah pelabuhan.
- f. Pemberian layanan maksimal sesuai dengan SOP yang ada.
- g. Adanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas baik di Pelabuhan maupun Bandara.
- h. Adanya upaya peningkatan target untuk penjamah makanan di semua TPP agar mengikuti kursus penjamah makanan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan pangan yang baik
- i. Adanya dukungan dari pemilik TPP, TTU dan ISPAB untuk melakukan IKL sehingga pelaksanaan IKL dapat berjalan dengan baik
- j. Adanya dukungan peraturan perundangan-undangan untuk pelaksanaan kegiatan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara.
- k. Komitmen bersama SDM pelaksana program di induk dan seluruh wilayah kerja dalam kinerja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi kelompok substansinya.

7. Kendala/ Masalah yang Dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja indikator Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/ bandara/ PLBDN di wilayah kerja BKK Kelas I Padang Tahun 2025 adalah :

- a. Data yang digunakan dalam perhitungan capaian hanya diambil hingga tanggal 15 Juni 2025, Namun, proyeksi capaian diperkirakan sampai dengan akhir juni 2025 2 parameter yang belum mencapai target tersebut berpotensi mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan pelaku perjalanan di pelabuhan dan bandara yang masih ditemukan belum sesuai ketentuan.
- c. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kapal yang baru datang dari wilayah terjangkit masih dalam keadaan karantina. Dan untuk melakukan pemeriksaan kapal tersebut, petugas harus mendatangi kapal yang dalam posisi labuh di *Quarantine Area*. Namun terkadang proses pemeriksaan kapal ini terkendala dengan tidak adanya kendaraan yang memadai / *safety* bagi petugas apalagi saat cuaca tidak kondusif, sehingga pemeriksaan alat angkut mengalami hambatan dan harus ditunda hingga cuaca bagus.
- d. Belum adanya badan usaha yang memiliki izin dari Kemenkes RI untuk melakukan tindakan penyehatan alat angkut.
- e. Masih adanya TPP yang belum dilakukan pelaksanaan labelling dan SLHS karena untuk mencapai target Pelabuhan dan Bandara Sehat harus minimal 75% memiliki label pengawasan dan SLHS
- f. Pelaksanaan survei vektor yang tidak sesuai perencanaan awal karena faktor cuaca yang tidak menentu serta factor internal lainnya
- g. Kendaraan operasional yang tidak memadai sehingga menyulitkan untuk mobilisasi alat dan bahan di lapangan terutama pada kegiatan pemasangan perangkat dan fogging

8. Pemecahan Masalah

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelayanan vaksinasi meningitis pada agen travel atau penyelenggara ibadah umrah.
- b. Petugas melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku perjalanan secara langsung dan juga melalui media sosial BKK Kelas I Padang.
- c. Kepala BKK Kelas I Padang melakukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait pemeriksaan kedatangan kapal dari luar negeri, Kepala BKK Kelas I Padang memberikan sedikit kelonggaran waktu dalam melakukan pemeriksaan sehingga keselamatan / *safety* petugas juga lebih terjaga.

- d. Melakukan IKL pada saat inspeksi sekaligus penyuluhan kepada pemilik TPP serta penjamah makanan mengenai prinsip hygiene sanitasi dalam pengolahan pangan
- e. Melakukan upaya peningkatan kapasitas penjamah makanan melalui kursus penjamah pangan yang diadakan langsung oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan melalui LMS
- f. Untuk faktor cuaca, maka kegiatan diundur dan dilakukan pada hari berikutnya agar lebih efektif.
- g. Melakukan pengadaan kendaraan bermotor untuk pelaksanaan mobilisasi di lapangan agar kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal.

9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan teknis dan dukungan teknis dalam rangka kekarantinaan kesehatan dengan besaran sesuai dengan Pagu Anggaran Tahun 2025.
- b. Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini sebesar Rp 1.038.813.000,- dengan realisasi sebesar Rp 214.968.600. Capaian kinerja sebesar 0.94, sehingga nilai efisiensi dapat dilihat dari rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

- E = Efisiensi
- PAKi = Pagu Anggaran Kinerja Indikator
- CKi = Capaian Kinerja Indikator
- RAKi = Realisasi Anggaran Kinerja Indikator
- NE = Nilai Efisiensi

Dari rumus di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$87,12\% = \frac{(1.754.793.000 \times 0.94) - 212.448.600}{(1.754.793.000 \times 0.94)} \times 100\%$$

$$267,8\% = (50\% + \left(\frac{87,12\%}{20} \times 50\right))$$

Jadi, nilai efisiensi pada Indikator Pertama ini adalah 267,8% yang artinya kinerja BKK Kelas I Padang pada indikator pertama ini telah efisien sebab capaian

kinerja lebih besar dari realisasi anggaran yaitu capaian kinerja sebesar 0,94 atau 94% sedangkan realisasi anggaran sebesar 12,11% sehingga terdapat potensi penghematan anggaran sebesar 87,89%.

Efisiennya sumber daya dipengaruhi oleh kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan rutin sehingga target yang ditentukan dapat tercapai meskipun terdapat beberapa kendala yang ditemukan karena adanya perubahan definisi operasional pada pertengahan tahun sehingga ada parameter yang sulit untuk dicapai karena menyangkut ketersediaan anggaran.

INDIKATOR KEDUA

Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

1. Pengertian

Balai Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, dalam melaksanakan tugas tersebut maka menyelenggarakan fungsi respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan lingkungan. Yang mana BKK Kelas I Padang telah melakukan upaya pengendalian terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional indikator ini adalah jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di pelabuhan/ bandara dibandingkan dengan jumlah faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam periode satu tahun. Jenis faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah :

a) Jenis Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang

- Pelaku perjalanan dengan Suhu tinggi $>37,5$
- Pelaku perjalanan positif COVID 19
- Pelaku perjalanan datang dan berangkat dalam keadaan sakit
- Pelaku perjalanan dengan saturasi <95
- Pelaku perjalanan Hb $<8,5$
- Calon Jemaah haji yang belum vaksinasi meningitis
- ICV palsu/expired
- HIV/TB/Malaria positif
- Penyakit menular yang menimbulkan wabah

b) Jenis Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Alat Angkut

- Kapal yang melakukan pelanggaran karantina
- Kapal yang terjangkit
- Kapal yang ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor

- c) Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Barang
- Barang yang berisiko bagi kesehatan (Jenazah)
 - Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Lingkungan
 - Tempat pengolahan makanan yang tidak memenuhi syarat
 - Hygiene sanitasi bangunan umum yang tidak memenuhi syarat
 - Tempat penyediaan air bersih yang tidak memenuhi syarat
 - Keberadaan vektor yang melebihi syarat/ambang batas pada lingkungan

3. Rumus/ Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan orang alat angkut, barang dan lingkungan dibagi jumlah faktor risiko pada orang dikali 100%. Sehingga rumus penghitungannya menjadi :

$$N = X/Y \times 100\%$$

Keterangan :

- N = Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
X = Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Y = Jumlah faktor risiko pada orang

4. Capaian Indikator

- a) Perbandingan Target dan Realisasi Kegiatan .

Capaian indikator target dan realisasi kegiatan adalah 100% , yang artinya setiap faktor risiko pada orang tahun 2024 dapat dikendalikan

$$N = \frac{722}{722} \times 100\%$$

$$N = 100\%$$

Perbandingan target dan realisasi kegiatan semester 1 tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Faktor Risiko pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan yang
ditemukan dan dikendalikan Semester I Tahun 2025

No	Faktor Risiko	Jumlah Faktor Risiko yang ditemukan	Jumlah Faktor Riskiko yang Dikendalikan
1	2	3	4
A	Faktor Risiko Orang	658	658
	Pelaku perjalanan dengan suhu Tinggi >37,5	0	0
	Pelaku perjalanan dengan COVID 19	0	0
	Pelaku perjalanan yang sakit	626	626
	pelaku perjalanan yang Hamil >32 minggu	25	25
	pelaku perjalanan dengan Penyakit menular yang menimbulkan wabah	2	2
	ICV Palsu/Expired	5	5
B	Faktor Risiko Alat Angkut	52	72
	Kapal terjangkit penyakit yang menimbulkan wabah	0	0
	Pesawat haji dari Arab Saudi	42	68
	Dokumen Kesehatan Kapal Tidak Lengkap/ Tidak Berlaku	4	0
	Kapal yang ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor	6	4
C	Faktor Risiko Barang	0	0
	Jenazah yang tidak memenuhi syarat	0	0
D	Fakto Risiko Lingkungan	12	12
	TTU Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0
	TPM Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0
	Air Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0
	Keberadaan vektor yang melebihi syarat/ ambang batas	12	12
Total		722	722

Dari tabel 3.2 diketahui bahwa pada semester 1 tahun 2025 jumlah faktor risiko penyakit yang ditemukan sebanyak 722 faktor risiko dan dilakukan pengendalian sebanyak 722 faktor risiko, maka persentase faktor risiko yang dikendalikan sebanyak 100%. perbandingan target dan realisasi indikator kedua dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Semester I Tahun 2025



Dari grafik 3.8 diketahui bahwa capaian kinerja faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 105%.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Grafik 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2020 s/d Semester I 2025



Pada grafik 3.9 dapat diketahui bahwa dari tahun 2020 sampai semester 1 tahun 2025 semua faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah dikendalikan sebesar 100%. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan dari tahun 2023 dan pada semester 1 tahun 2025 terjadi penurunan.

- c) Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Tahun 2020 – Semester I 2025

Grafik 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun Semester I 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020- 2024)



Pada grafik 3.10 dapat diketahui bahwa realisasi indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada semester 1 tahun 2025 yaitu 100%, hal ini sesuai dengan target RAK semester 1 tahun 2025.

- d) Perbandingan realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Grafik 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Target Nasional



Dari grafik 3.12 dapat diketahui bahwa realisasi indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada semester 1 tahun 2025 yaitu 100% dan sesuai target Nasional yaitu 94%

- e) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan organisasi sejenis/setara

Grafik 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indikator Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Organisasi Sejenis



Dari grafik 3.11 diketahui bahwa faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan oleh BKK Kelas I Padang dengan BKK yang sejenis/setara yaitu BKK Pekanbaru dengan target 96%, BKK Semarang dengan target 93% dan BKK Palembang dengan target 100%. Dari grafik dapat di lihat bahwa realisasi sudah mencapai 100%.

5. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

- a) Faktor Risiko Pada Orang

1. Menolak/Menunda keberangkatan pelaku perjalanan.
2. Melakukan Tindakan Kegawatdaruratan.
3. Melakukan pelayanan rujukan.
4. Melakukan Anamnesa pemeriksaan fisik dan Gejala Klinik pada pelaku perjalanan.
5. Melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan pelaku perjalanan

Tabel 3.10
Faktor Risiko Pada Orang Semester I Tahun 2025

NO	Pemeriksaan Orang	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko				Total dikendalikan	%
			Rujuk	Vaksinasi/Penerbitan ICV Baru	Tolak Berangkat	Hasil Anamnesa Pemeriksaan Fisik dan Gejala Klinis Penumpang Layak melakukan Perjalanan		
1	Pelaku perjalanan dengan suhu Tinggi >37,5	0	0	0	0	0	0	100
2	Pelaku perjalanan dengan COVID 19	0	0	0	0	0	0	100
3	Pelaku perjalanan yang sakit	626	74	0	7	545	626	100
4	pelaku perjalanan yang Hamil >32 minggu	25	0	0	6	19	25	100
5	pelaku perjalanan dengan Penyakit menular yang menimbulkan wabah	2	0	0	2	0	0	100
6	ICV Palsu/Expired	5	0	5	0	0	5	100
Total			658					658

b) Faktor Risiko Alat Angkut

Melakukan tindakan sanitasi pada alat angkut (Fumigasi dan Disinseksi). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Faktor Risiko Pada Alat Angkut Semester I Tahun 2025

NO	Pemeriksaan Alat Angkut	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko					Total dikendalikan	%
			Fumigasi	Disinseksi	OME	Bebas Karantina	Surat Pernyataan		
1	Kapal terjangkit penyakit yang menimbulkan wabah	0	0	0	0	0	0	0	100
2	Pesawat haji dari Arab Saudi	42	0	42	0	0	42	42	100
3	Dokumen Kesehatan Kapal Tidak Lengkap/ Tidak Berlaku	4	0	0	0	0	4	0	100
4	Kapal yang ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor	6	1	2	3	0	0	6	100
Total		52							52

c) Faktor Risiko Barang

Tidak ditemukannya faktor risiko jenazah yang menyebabkan ditolak pengiriman jenazah, dan dokumen jenazah sudah lengkap.

d) Faktor Risiko Lingkungan

1. Memberikan masukan kepada pemilik bangun/usaha menyediakan fasilitas sanitasi
2. Melakukan Tindakan pengendalian Spraying dan Fogging

Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.12
Faktor Risiko Pada Lingkungan Semester I Tahun 2024

NO	Pemeriksaan Lingkungan	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian Faktor Risiko			Total dikendalikan	%
			Spraying	Fogging	Penyuluhan		
1	TTU Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0	0	0	0	100
2	TPM Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0	0	0	0	100
3	Air Memenuhi syarat yg sebelumnya tidak memenuhi syarat	0	0	0	0	0	100
4	Keberadaan vektor yang melebihi syarat/ ambang batas	12	6	6	0	12	100
Total		12					12

6. Analisis Penyebab Keberhasilan

Analisis keberhasilan capaian target dikarenakan semua faktor risiko yang disebabkan oleh orang, alat angkut, barang dan lingkungan selalu dikendalikan oleh petugas, yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi target kegiatan ke seluruh wilayah kerja pada awal tahun anggaran
- 2) Pengawasan kedatangan dan keberangkatan penumpang secara ketat dan berkesinambungan
- 3) Pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan alat angkut sesuai SOP dan standar Kekejarantinaan Kesehatan
- 4) Tindakan pengendalian (Desinfeksi, Desinseksi dan fumigasi) pada alat angkut yang ditemukan kehidupan vektor
- 5) Menjalin kerjasama dengan lintas sektor diantaranya Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur, Otoritas Bandara Udara Wilayah II

Padang, PT. Pelindo II Cabang Teluk Bayur, PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten di Sumatera Barat.

- 6) Adanya dukungan dari agen pelayaran dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian faktor risiko pada crew dan penumpang
- 7) Adanya dukungan alat komunikasi dan teknologi yang mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga kondisi Kesehatan crew dan penumpang dapat dipantau dengan cepat.
- 8) Kualitas SDM di BKK Kelas I Padang yang mendukung
- 9) Melakukan desiminasi informasi kepada lintas sektor dan lintas program baik melalui informasi media sosial maupun laporan resmi
- 10) Adanya sumber daya peralatan yang memadai, seperti Ambulance dan peralatan penunjang medis lainnya serta peralatan pengendalian risiko lingkungan seperti Spraycan dan Swingfog
- 11) Pengawasan, pembinaan dan advikasi secara rutin terhadap para pelaku usaha jasa boga, tempat pengolahan pangan, pihak penyedia jasa pengelolaan air minum serta adanya komitmen untuk mengendalikan risiko lingkungan
- 12) Fasilitas Kesehatan tempat rujukan yang tersedia dan dapat dijangkau dengan cepat

7. Kendala/ Permasalahan

- a) Pengendalian faktor risiko pada orang
 - Pengawasan lalu lintas orang terdapat kendala yaitu kemungkinan orang yang datang dalam kondisi belum menunjukkan gejala atau telah meminum obat penurun panas sehingga ketika melewati alat pemindai suhu orang tersebut tidak terdeteksi demam sedangkan penumpang yang sakit tersebut tidak menggunakan APD sehingga dapat menularkan kepada orang lain.
 - Penumpang yang ditolak berangkat karena kondisi kesehatan tidak menerima dan terjadi keributan
 - Masih adanya pelaku perjalanan/Umroh dengan ICV Palsu
- b) Pengendalian faktor risiko pada alat angkut
 - Jauhnya lokasi labuh Kapal pada area karantina sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menuju kapal tersebut, jika kapal masih mempunyai muatan maka kegiatan penyehatan akan tertunda.

- Belum tersedianya penyelenggaraan hapus tikus/serangga yang memenuhi syarat sesuai aturan dalam melaksanakan desinseksi/fumigasi di kota Padang.
 - Kurang pengetahuan crew kapal terhadap perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit di atas kapal, sehingga mengakibatkan kurang memperhatikan faktor risiko keberadaan dan masuknya vektor dan BBP di alat angkut.
 - Crew kapal yang tidak menjaga kebersihan sanitasi kapal mengakibatkan berkembangbiaknya vektor dengan cepat meskipun telah dilakukan tindakan penyehatan kapal
- c) Pengendalian faktor risiko pada lingkungan
- Kurangnya kesadaran masyarakat di pelabuhan untuk menjaga kebersihan lingkungan
 - Adanya Tempat pembuangan sampah sementara yang tidak mempunyai tutup sehingga menjadi tempat perindukan vektor
 - Adanya jasadnya dan tempat pengolahan makanan (TPM) yang belum bisa memiliki labelling dan SLHS
 - Adanya penjamah makanan yang belum mempunyai sertifikat penyuluhan penjamah makanan

8. Pemecahan Masalah

- a) Pengendalian Faktor risiko pada orang
- Memasang banner dan himbuan untuk selalu menggunakan masker jika berada di ruang tertutup dan tempat-tempat umum untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, terutama bagi orang yang sakit.
 - Memberikan edukasi kepada calon penumpang yang ditolak berangkat tentang penyakitnya serta bahaya yang ditimbulkan, dan bekerja sama dengan lintas sektor seperti avsec dan keamanan jika terjadi keributan.
 - Melakukan pengawasan ICV secara menyeluruh kepada Jamaah Umroh
- b) Pengendalian Faktor risiko pada alat angkut
- Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Navigasi untuk menetapkan area labuh kapal max 2 mil.
 - Memberikan edukasi kepada crew kapal tentang pentingnya menjaga kebersihan sanitasi kapal.

c) Faktor risiko pada lingkungan

- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sanitasi lingkungan dan meningkatkan program kerja kader kesling yang telah dilatih
- Melakukan sosialisasi terhadap TPM yang baru buka agar memiliki SLHS dan memperbaiki beberapa komponen item pemeriksaan yang belum lengkap agar memenuhi syarat untuk labeling
- Menyarankan agar pemilik TPM untuk pelatihan penjamah makanan baik di Labkes maupun di Dinas Kesehatan setempat
- Pembinaan pengawasan kepada pemilik penyedia air bersih/air minum

9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2024 capain kinerja faktor risiko yang dikendalikan pada orang adalah 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 171.864.000,-. Sedangkan realisasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.75.464.898,-. Penghitungan efisiensi dan nilai efisiensi sumber daya persentase faktor risiko Penyakit di Pintu Masuk yang dikendalikan pada Orang, Barang dan Alat Angkut dapat dihitung dari rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :
E = Efisiensi
NE = Nilai Efisiensi
PAKi = Pagu Anggaran keluaran i
RAKi = Realisasi Anggaran keluaran i
CK = Capaian Keluaran i

Dari rumus di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$90,81\% = \frac{(129.490.000 \times 1) - 12.498.600}{(129.490.000 \times 1)} \times 100\%$$

$$275\% = \left(50\% + \left(\frac{90,81}{20} \times 50\right)\right)$$

Jadi, nilai efisiensi pada Indikator Kedua iR adalah 90,81%. Ini berarti kinerja BKK Kelas I Padang pada indikator Keduaini telah efisien, karena terdapat pagu blokir sebesar Rp. 66.814.000,-.

INDIKATOR KETIGA

INDEKS PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DI PINTU MASUK NEGARA

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dilakukan dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun untuk mengendalikan faktor risiko masuk dan keluarnya penyakit yang terdapat dalam alat angkut dan muatannya. Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara ini terdiri dari 10 sub indikator yaitu :

1. Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB, dan Bencana di Wilayah Layanan BKK
Respon sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan BKK adalah suatu sistem yang dapat memantau perkembangan trend suatu penyakit menular potensial KLB/Wabah dari waktu ke waktu dan memberikan sinyal peringatan (alert) kepada pengelola program bila kasus tersebut melebihi nilai ambang batasnya sehingga mendorong program untuk melakukan respons.
2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
Indeks pinjal adalah angka yang menunjukkan kepadatan pinjal pada tubuh tikus. Indeks pinjal digunakan untuk mengetahui kepadatan investasi rata-rata dari pinjal yang ditemukan pada jumlah tikus yang tertangkap.
3. Persentase bandara/pelabuhan dengan tidak ditemukan larva *Anopheles* (<1)
Tidak ditemukan larva *Anopheles sp* artinya berdasarkan identifikasi larva dari hasil pengamatan yang dilakukan, tidak ditemkan larva *Anopheles sp* (<1).
4. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa (<2)
Indeks populasi kecoa merupakan salah satu indicator kondisi hygiene sanitasi suatu tempat atau lingkungan. Berdasarkan Permenkes No. 50 tahun 2018, kepadatan kecoa dikatakan rendah apabila nilainya kurang dari 2.
5. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2
Kepadatan lalat adalah suatu indikator kurang optimalnya cara pengelolaan sampah atau rendahnya kondisi hygiene sanitasi pada suatu tempat. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan berkaitan dengan penyebab penyakit diare sebagai salah satu vector borne disease. Kepadatan lalat dikatakan rendah apabila berdasarkan hasil pengukuran nilainya adalah kurang dari 2.

6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI Perimeter = 0
House Index perimeter merupakan persentase bangunan yang positif jentik dari seluruh bangunan yang diperiksa yang ada di area perimeter pelabuhan dan bandara. Nilainya harus nol sesuai dengan yang dipersyaratkan secara internasional di pintu masuk negara.
7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI Buffer < 1
House Index Buffer merupakan persentase bangunan yang positif jentik dari seluruh bangunan yang diperiksa yang ada di area Buffer Pelabuhan dan Bandara dengan angka harus <1, area Buffer ini berjarak 400 meter dari batas wilayah pelabuhan.
8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
Tempat-tempat umum memenuhi syarat yakni merupakan kondisi sanitasi tempat-tempat umum dimana tidak terdapat faktor risiko penularan penyakit sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi penggunaannya dengan minimal 3 kali pemeriksaan harus memenuhi syarat
9. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat dilakukan dengan melakukan inspeksi sanitasi terhadap Tempat Pengolahan Makanan atau TPM terdiri dari jasa boga, restoran, rumah makan, gerai pangan jajanan dan sentra pangan jajanan yang berada dilingkungan pelabuhan dan bandara dengan minimal 3 kali pemeriksaan harus memenuhi syarat.
10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis
Pengawasan kualitas air bersih dilakukan dengan Inspeksi sanitasi sarana penyedia air bersih dan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi. Pengujian berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Pengawasan dilakukan terhadap sarana air reservoir dan hidran serta air depot air minum yang berada pada daerah buffer dan perimeter.

1. Definisi Operasional

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah kegiatan yang terdiri dari pengawasan terhadap faktor-faktor penyebab penyakit yang memenuhi syarat kesehatan sehingga terhindar dari penyakit akibat vektor dan

menciptakan sanitasi lingkungan yang baik di wilayah pelabuhan/ bandara sebagai gerbang pintu masuk negara. Status Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

2. Cara Perhitungan

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dibagi jumlah capaian indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dikali 100%.

$$N = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

N = Presentase indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

X = Jumlah indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

Y = Jumlah capaian indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

3. Capaian Indikator

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja dengan target indeks pengendalian risiko di pintu masuk negara semester I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

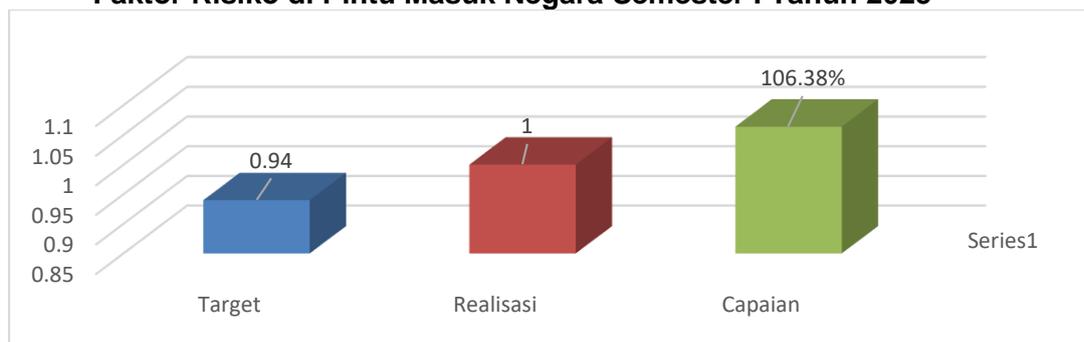
Tabel 3.13
Target dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara Semester I Tahun 2025

No	Indeks Pengendalian Faktor Risiko	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	sinyal	100 %	100%	100%
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	Pelabuhan/ bandara	100%	100%	100%
3	Persentase bandara/pelabuhan dengan tidak ditemukan larva <i>Anopheles</i> (<1)	Pelabuhan/ bandara	100%	100%	100%
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan indek populasi kecoa <2	Pelabuhan/ bandara	100%	100%	100%
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan indek populasi lalat <2	Pelabuhan/ bandara	100 %	100%	100%
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI Perimeter = 0	Pelabuhan/ bandara	100%	100%	100%
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI Buffer <1	tempat	100%	100%	100%
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	tempat	96%	100%	104,17%
9	Persentase lokus TPM memenuhi syarat dengan minimal 2 kali pemeriksaan	sarana	90%	100%	111,11%
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan	tempat	90%	100%	111 ,11%

No	Indeks Pengendalian Faktor Risiko	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologis/bakteriologis				

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indeks pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara adalah 0,94 dengan realisasi kinerja sebesar 1.

Grafik 3.13
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 0,95 target didapatkan realisasi sebesar 1 yang berarti capaian indeks pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk negara sebesar 106.38 %

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2025)

Perbandingan capaian kinerja indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara tersebut dapat dilihat dari uraian dibawah ini :

- 1) Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB, dan Bencana yang di respon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80 %

Perbandingan capaian kinerja Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan BKK Kelas I Padang 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2025 BKK Kelas I Padang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.14
Perbandingan Respon SKD, KLB dan Bencana
Tahun 2021 s.d Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian SKD, KLB dan bencana dari tahun 2021 sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar 100%.

Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di wilayah layanan BKK Kelas I Padang pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100%. Kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk pengawasan kedatangan kapal dan pesawat udara yang datang dari Negara atau Wilayah Terjangkit penyakit menular potensial wabah dan penyakit menular lainnya berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan RI melalui situs resminya (<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>)

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku perjalanan di pelabuhan dan bandara. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan peralatan Thermal scanner untuk mendeteksi suhu lebih dari 37,5⁰C. Hal ini dilakukan karena salah satu indikator untuk mengetahui seseorang menderita penyakit COVID-19, Monkeypox dan penyakit menular lainnya (*Disease Outbreak New*) adalah suhu diatas 37,5⁰C.

Selama bulan Januari sd Juni 2025 ditemukan beberapa kasus penyakit menular potensial KLB yaitu DBD, Suspek Meningitis dan Suspek MERS CoV. Untuk kasus DBD di temukan 2 kasus di Pelabuhan Sikakap pada bulan Januari 2025 dan dinyatakan sembuh melalui penanganan yang cepat dan efektif dari tim BKK Kelas I Padang bekerjasama dengan lintas sektor/program terkait.

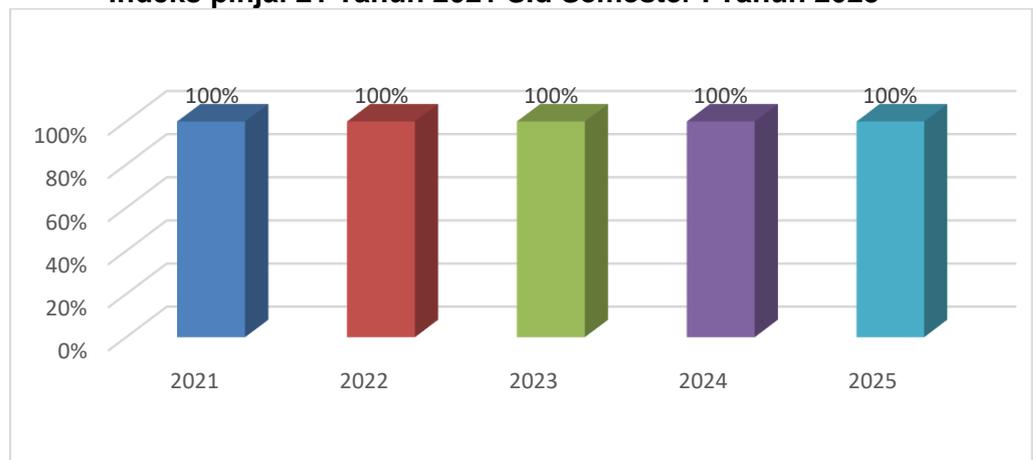
Ditemukan 1 kasus suspek meningitis pada penumpang pesawat di Bandara Internasional Minangkabau (bulan Februari 2025) dan 1 kasus di Pelabuhan Tua Pejat (bulan Februari 2025). Penanganan cepat dilakukan dengan merujuk pasien ke rumah sakit rujukan, pelacakan kontak erat,

notifikasi dan pelaporan ke SKDR. Tidak di temukan kasus sekunder pada kontak erat yang di pantau dan untuk penumpang kapal berdasarkan hasil penyelidikan kasus didiagnosis sebagai Meningitis TB Stadium III.

Ditemukan dua kasus suspek Mers-CoV pada jemaah umroh (bulan April 2025) dan 1 kasus pada jemaah haji (wafat di pesawat) yang kembali dari Arab Saudi di Bandara Internasional Minangkabau (bulan Juni 2025). Telah dilakukan penanganan pada ketiga kasus suspek tersebut melalui pelacakan kontak, notifikasi dan pelaporan ke SKDR. Dari temuan kasus ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap penyakit menular potensial wabah.

- 2) Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks pinjal ≤ 1
Perbandingan jumlah capaian Indeks pinjal ≤ 1 Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2025 BKK Kelas I Padang terlihat pada grafik berikut:

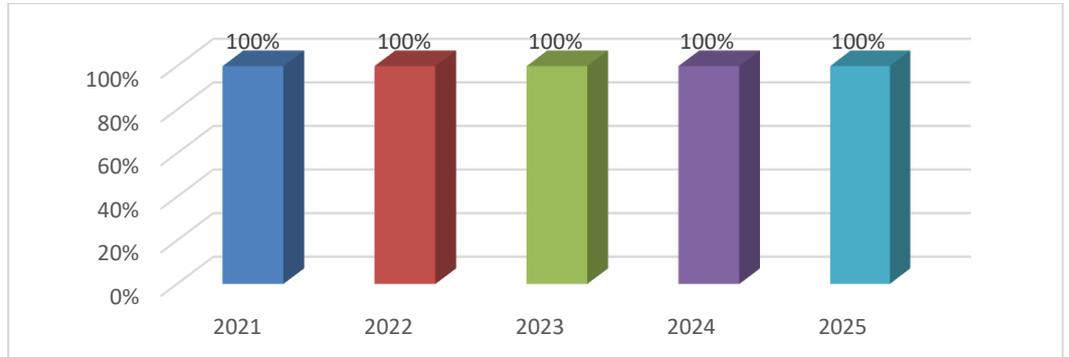
Grafik 3.15
Perbandingan Capaian persentase pelabuhan/bandara dengan Indeks pinjal ≤ 1 Tahun 2021 S.d Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks pinjal ≤ 1 dari tahun 2021 sampai dengan Semester I tahun 2025 sama yaitu 100%.

- 3) Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)

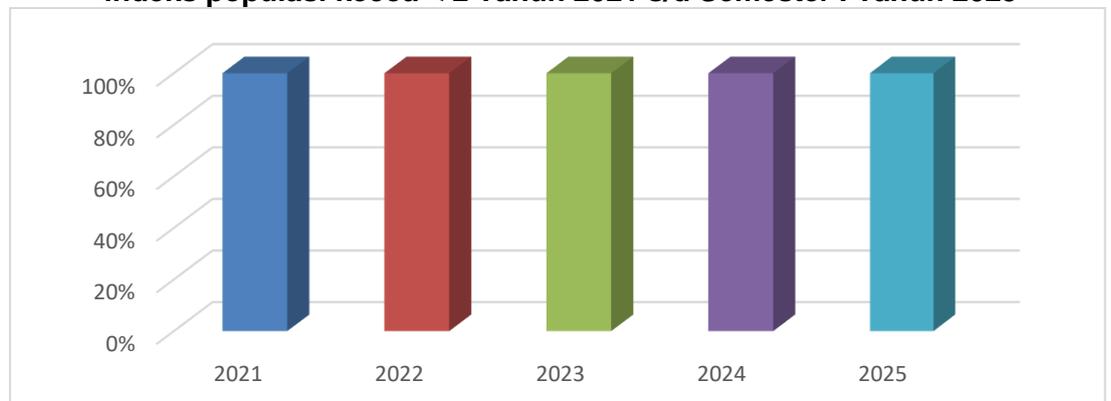
Grafik 3.16
Perbandingan Capaian Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1) Tahun 2021 s/d Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah capaian tidak ditemukan larva anopheles (<1) dari tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2025 yaitu 100%.

- 4) Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2

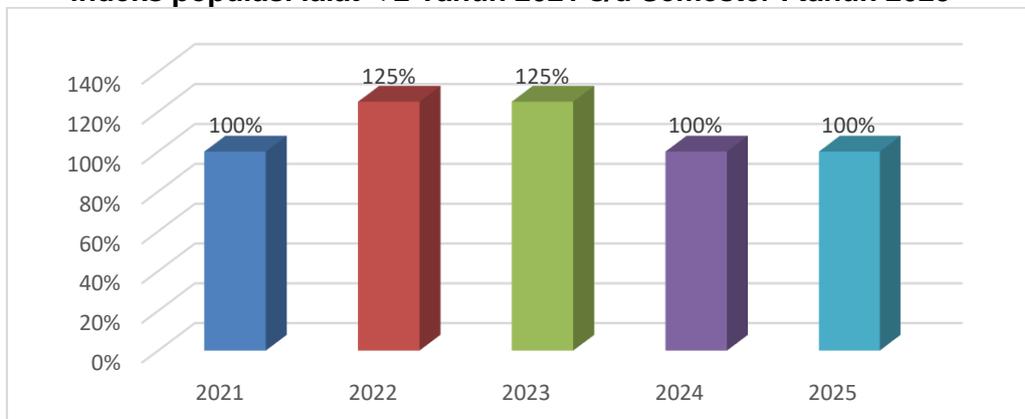
Grafik 3.17
Perbandingan Capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2 Tahun 2021 s/d Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah capaian persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2 dari tahun 2021 sampai dengan Semester I tahun 2025 yaitu sama sebesar 100%.

5) Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2

Grafik 3.18
Perbandingan Capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2 Tahun 2021 s/d Semester I tahun 2025

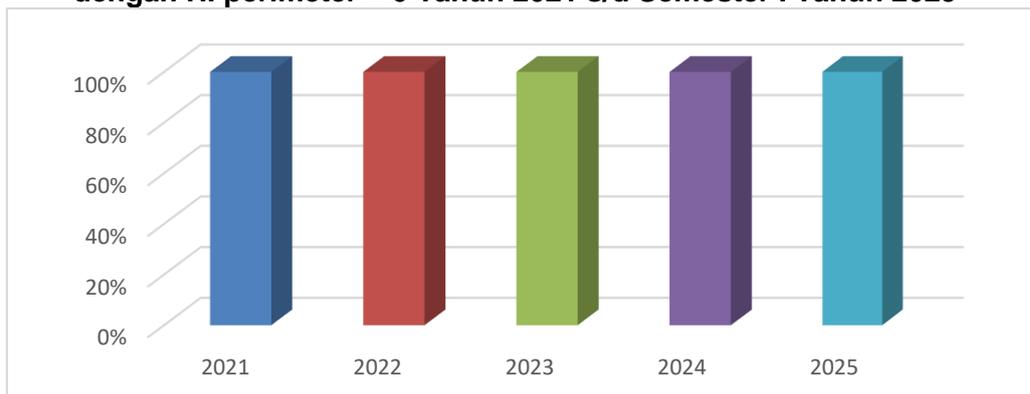


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2 dari tahun 2021 sampai dengan Semester I tahun 2025 adalah 100% pada tahun, 2021, 2024 dan tahun 2025.

6) Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0

Perbandingan jumlah capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 dari tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2025 BKK Kelas I Padang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.19
Perbandingan capaian Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0 Tahun 2021 s/d Semester I Tahun 2025

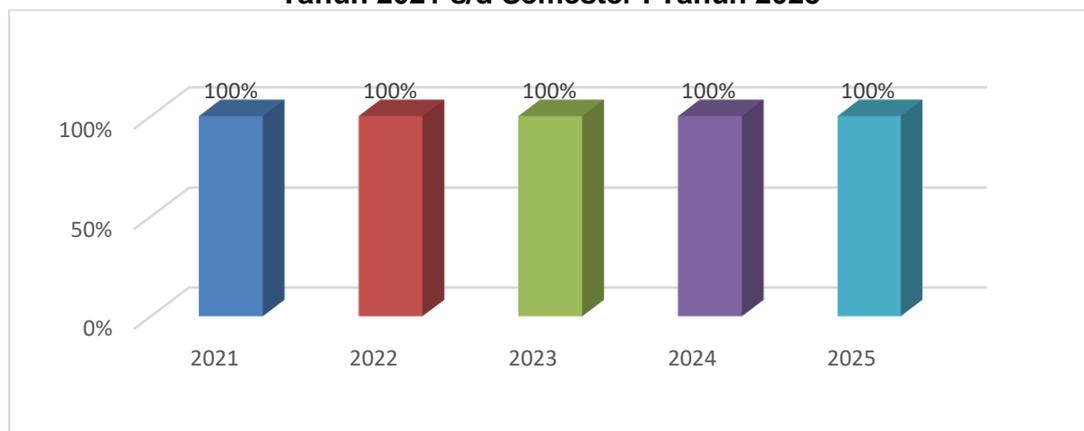


Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 dari tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2025 sama yaitu sebesar 100%.

7) Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI buffer < 1

Perbandingan jumlah capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan buffer < 1 dari tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2025 BKK Kelas I Padang dapat dilihat pada grafik berikut:

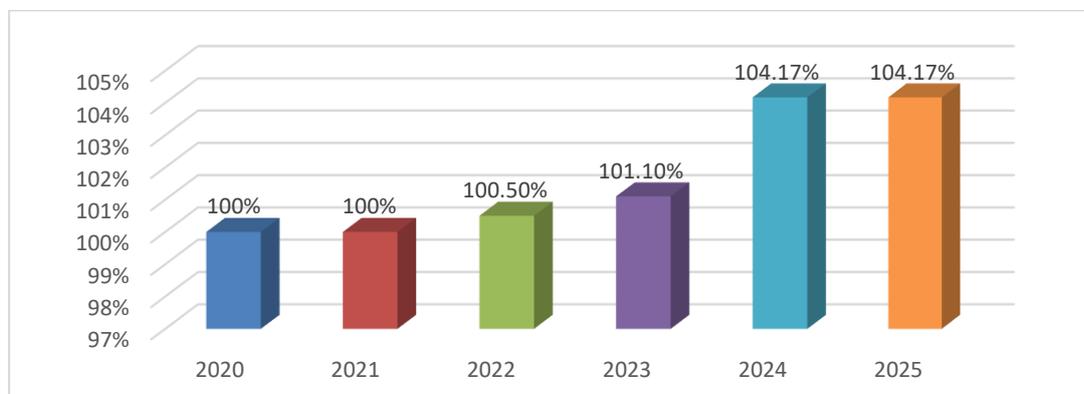
Grafik 3.20
Perbandingan capaian
Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1
Tahun 2021 s/d Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas terlihat jumlah capaian Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 dari tahun 2021 sampai dengan Semester I tahun 2025 sama yaitu sebesar 100%.

8) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan

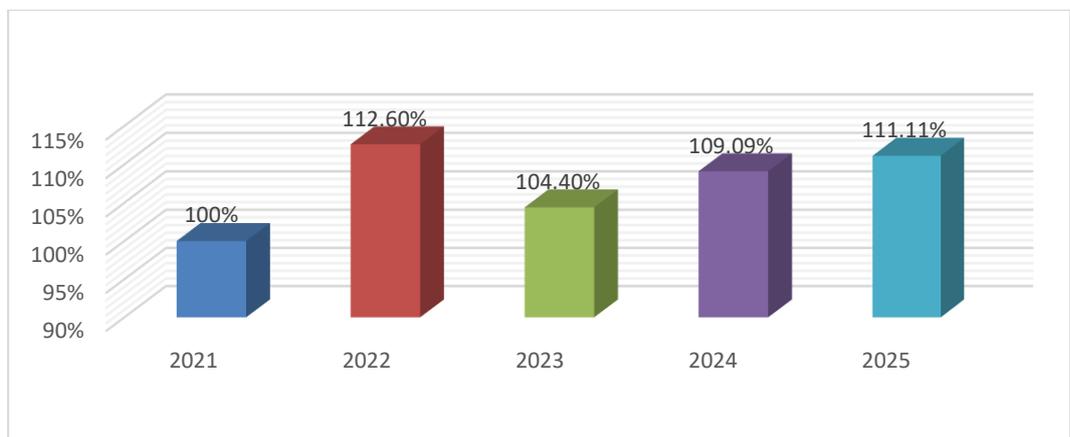
Grafik 3.21
Perbandingan capaian persentase lokus TTU
memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
Tahun 2021 s.d Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian TTU dengan minimal 3 kali pemeriksaan dari tahun 2021 sampai dengan 2021 sama yaitu 100%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian persentase TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan yaitu 100,5 %. Hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator pada tahun 2024 TTU yang memenuhi syarat dengan 3 kali pemeriksaan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2023 capaian persentase TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan yaitu 101,1 % karena masih terdapat TTU yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2 unit yaitu di Pelabuhan Teluk Bayur dan Wilker Bandara Internasional Minangkabau. Untuk tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 capaian TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan sebanyak 104,17 %.

- 9) Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
Perbandingan capaian kegiatan persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan dari tahun 2021 sampai dengan Semester I tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.22
Perbandingan Capaian Persentase lokus TPM laik hygiene
Tahun 2021 s.d Semester I Tahun 2025



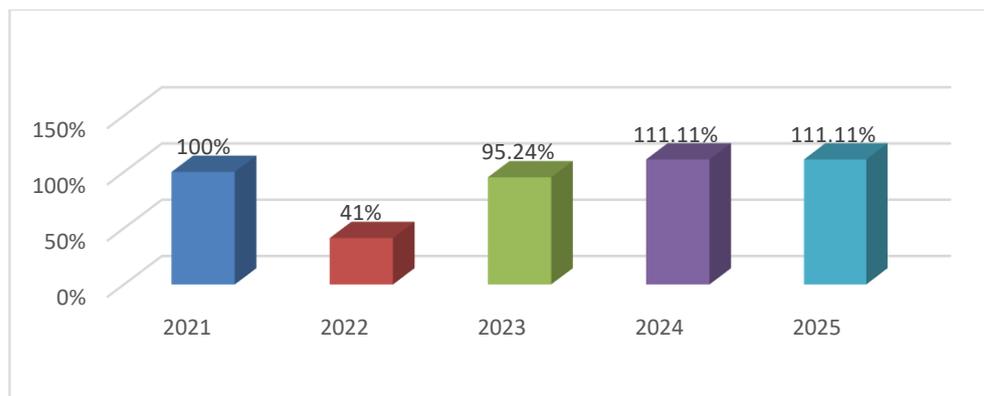
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan pada tahun 2021 yaitu 100%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan sebesar 112,6 %. Hal ini dikarenakan adanya perubahan definisi operasional indikator 3 pada TPM dengan

minimal 2 kali penilaian memenuhi syarat. Pada tahun 2023 capaian persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan sebesar 104,4 % dikarenakan masih adanya TPM yang tidak memenuhi syarat di Wilayah Kerja Sikakap dan Tua Pejat. Pada tahun 2024 persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan yaitu 109,09% karena ada penambahan 1 TPM lagi pada bulan Desember di Wilker Bandara Internasional Minangkabau yang belum diperiksa minimal 2 kali pemeriksaan. Sedangkan untuk Semester I tahun 2025 bahwa capaian persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan sebesar 111.11 %.

- 10) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

Perbandingan capaian Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis dari tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 3.23
Perbandingan Capaian Persentase
lokus kualitas air bersih memenuhi syarat Kesehatan
Tahun 2021 s.d Semester I Tahun 2025

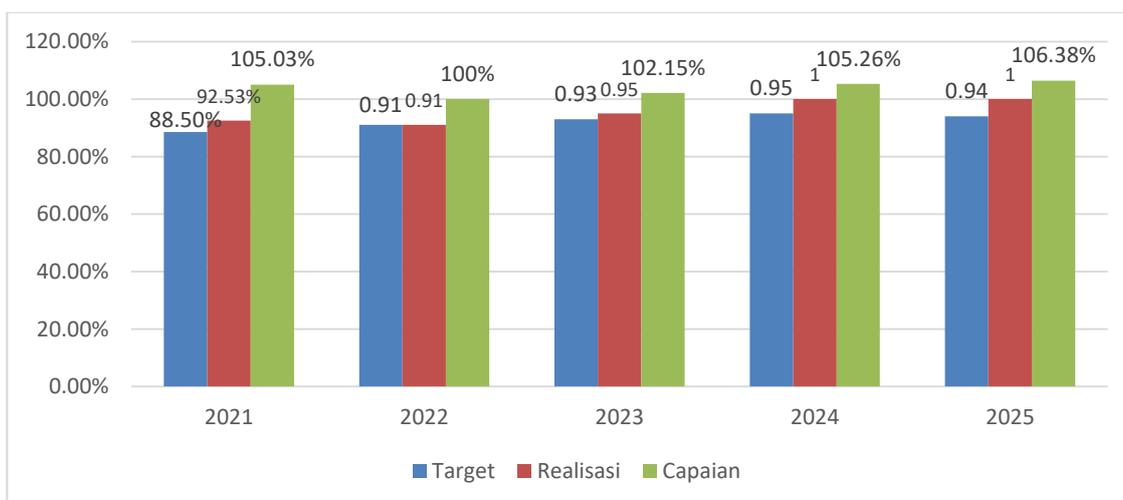


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis tahun 2022 adalah 41 %, dari 3 lokus yang ditargetkan hanya 1 lokus yang tercapai dikarenakan tidak adanya

anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan pada tahun sebelumnya capaian pemeriksaan sarana air bersih tercapai 100% dengan definisi operasional yang berbeda dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 dan tahun 2025 persentase capaian lokus kualitas air bersih memenuhi syarat dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia dan 6 kali pemeriksaan bakteriologis yaitu 111,11%.

- C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2025).
 Perbandingan capaian kinerja tahun 5 dengan target jangka menengah (RAK Tahun 2010-2025) dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Ketiga Semester I Tahun 2025
Dengan Target Jangka Menengah RAK 2021-2025

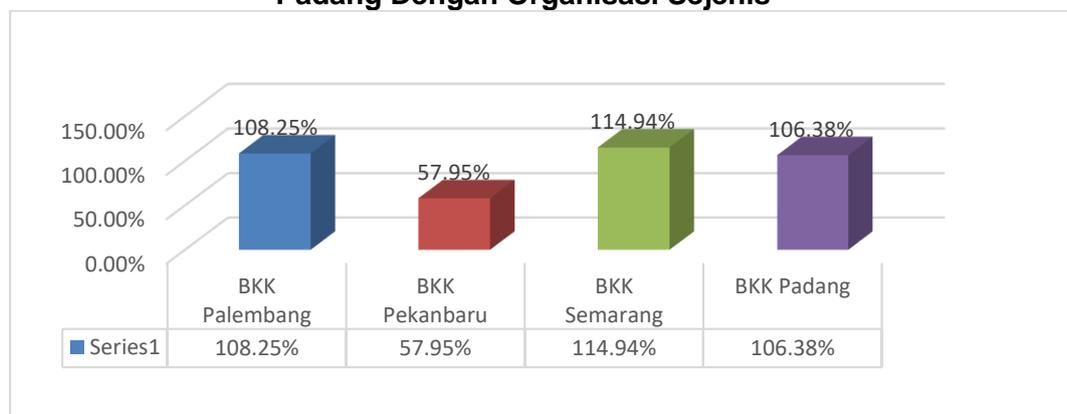


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara pada Semester I tahun 2025 yaitu 0,94 berarti telah mencapai target jangka menengah (RAK Tahun 2021-2025) tahun 2024 yaitu 1 dengan angka capaian sebesar 106.38 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dilaksanakan secara optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor.

- D. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Organisasi Setara/ sejenis (BKK Kelas I Palembang, BKK Kelas I Pekanbaru, BKK Kelas I Semarang)

Perbandingan capaian kinerja BKK Kelas I Padang dengan organisasi setara yaitu BKK Kelas I Palembang, BKK Kelas I Pekanbaru dan BKK Kelas I Semarang dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik 3.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 BKK Kelas I Padang Dengan Organisasi Sejenis



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indeks faktor risiko di pintu masuk negara BKK Kelas I Padang (106,38 %) dan lebih tinggi dari BKK Kelas I Pekanbaru (57,95 %) dan lebih rendah dari BKK Kelas I Palembang (108,25 %) dan BKK kelas I Semarang (114,94 %). Untuk semua capaian kinerja pada Semester I tahun 2025 bagi organisasi sejenis sudah diatas 100 %.

5. Analisa penyebab peningkatan/ penurunan Capaian Kinerja

Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara mencapai target yang ditentukan dengan indeks 1 dari target yang ditentukan yaitu sebesar 0,94, pencapaian target di disebabkan oleh :

- Adanya peningkatan antara koordinasi dan jejaring lintas sektor dan fasyankes dalam pelaksanaan pengendalian factor risiko lingkungan di pintu masuk negara
- Terbentuknya Tim Respon Penyakit kekarantinaan Kesehatan sehingga selain dapat melakukan pemantauan update data penyakit juga melakukan penyelidikan epidemiologi langsung terhadap temuan kasus maupun suspek

- c. Komitmen Bersama pelaksana program kegiatan di BKK Kelas I Padang sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai RPD dan RPK

6. Upaya/ Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

1. Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB, dan Bencana di Wilayah Layanan BKK.

Respon sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan BKK adalah suatu sistem yang dapat memantau perkembangan trend suatu penyakit menular potensial KLB/Wabah dari waktu ke waktu dan memberikan sinyal peringatan (alert) kepada pengelola program bila kasus tersebut melebihi nilai ambang batasnya sehingga mendorong program untuk melakukan respons. Kegiatan ini meliputi surveilans kedatangan kapal/ pesawat dari Negara/ Wilayah Terjangkit dan koordinasi surveilans penyakit di Wilayah Pelabuhan dengan target kegiatan sebanyak 12 kali (100%). Adapun upaya untuk mencapai Indikator adalah :

- Melakukan pelatihan intensif kepada petugas tentang prosedur penanganan KLB dan bencana, termasuk simulasi tanggap darurat.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat deteksi dan pelaporan sinyal SKD dan KLB. Sistem ini memungkinkan pengolahan data secara real-time untuk mendukung keputusan cepat.
- Membangun sinergi dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan instansi terkait untuk mempercepat alur informasi dan respons.
- Mengadakan transportasi medis dan peralatan kesehatan untuk mendukung mobilisasi dalam waktu singkat.
- Membuat Panduan Standar Operasional (SOP) agar setiap kejadian direspon secara terstruktur dan sistematis dalam waktu kurang dari 24 jam.

2. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes

Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pemetaan, persiapan alat dan bahan, pemasangan perangkap dan identifikasi tikus dan pinjal.

3. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria

Layanan survei faktor risiko penyakit malaria merupakan kegiatan survei jentik dan nyamuk dewasa *Anopheles* di wilayah perimeter dan buffer area.

4. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD

Layanan survei faktor risiko penyakit DBD dilaksanakan di BKK Kelas I Padang dengan pelaksanaan berupa survei jentik *Aedes sp*, larvasida dan indentifikasi jentik.

5. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare

Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pemasangan perangkap kecoa pada TPS dan rumah makan serta identifikasi. Selain itu juga dilakukan survei kepadatan lalat dengan menggunakan flygrill pada tempat-tempat perindukan lalat.

6. Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum

Pengawasan TTU merupakan rangkaian kegiatan IKL terhadap bangunan yang berada di wilayah kerja BKK Kelas I Padang.

7. Pengawasan hygiene sanitasi TPM

Tempat Pengolahan Makanan atau TPM terdiri dari jasa boga, restoran, rumah makan, gerai pangan jajanan dan sentra pangan jajanan yang berada dilingkungan pelabuhan dan bandara dengan.

8. Upaya Penyehatan Air

Pengawasan kualitas air bersih dilakukan dengan Inspeksi sanitasi sarana penyedia air bersih dan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi. Pengujian berdasarkan Permenkes Nomor 2 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Pengawasan dilakukan terhadap sarana air reservoir dan hidran serta air depot air minum yang berada pada daerah buffer dan perimeter.

7. Kendala/ masalah yang dihadapi

Kendala yang dihadapi pada Indikator indeks pengendalian faktor risiko di bandara/pelabuhan/PLBDN masuk Semester I Tahun 2025 adalah:

- a. Adanya perubahan anggaran yang dilakukan efisiensi di awal tahun 2025 sehingga harus melakukan perubahan kembali terhadap RPD dan RPK yang sudah ada
- b. Factor cuaca menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan kegiatan survei vektor terutama survei malaria
- c. Adanya reagen pemeriksaan sampel air yang sudah discontinued sehingga tidak compatible dengan alat yang sudah ada di BKK Kelas I Padang

8. Pemecahan masalah

Adapun pemecahan masalah yang dihadapi pada Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara Tahun 2024 adalah :

- Upaya pergerakan system komunikasi yang cepat agar dalam tahapan pengumpulan data bisa dilakukan dengan efek dan efiesn
- Melakukan upaya perbaikan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
- Pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan seperti rencana awal
- Tetap melakukan Upaya sosialisasi terkait kebijakan Label dan SLHS kepada pemilik TPP yang akan dilakukan pada kegiatan workshop penjamah makanan agar dapat melengkapi Upaya pemenuhan persyaratan agar dapat terdaftar di aplikasi OSS.

9. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penghitungan efisiensi dan nilai efisiensi sumberdaya indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan : E = Efisiensi
NE = Nilai Efisiensi
PAKi = Pagu Anggaran keluaran i
RAKi = Realisasi Anggaran keluaran i
CK = Capaian Keluaran i

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 3 dapat dilihat sebagai berikut :

$$E = \frac{((812.331.000 \times 1,06) - 81.183.800)}{(812.331.000 \times 1,06)} \times 100\% = 90,57$$
$$NE = \left(50\% + \left(\frac{90,57}{20} \times 50\right)\right)$$
$$= 276,425\%$$

Berdasarkan target kinerja indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar 0,94 dan realisasi kinerja 1 maka di dapat capaian kinerja indikator sebesar 106,38%, sedangkan berdasarkan anggaran dari pagu indikator indeks

pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar Rp. 812.331.000 dan realisasi sebesar Rp. 81.183.800,- (9,99 %).

Indikator indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk negara telah terlaksanan dengan efisien, karena capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran dengan realisasi anggaran 9,99 % dapat dicapai kinerja yang dicapai 106,38 %. Hasil efisiensi tersebut disebabkan karena adanya pagu blokir di beberapa kegiatan selama Semester I Tahun 2025.

INDIKATOR KEEMPAT

Nilai Kinerja Anggaran

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

1. Definisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konsteks. Aspek implementasi memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan dalam RKA-K/L secara tahunan. Aspek manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang cova dipecahkan melalui intervensi program.

2. Rumus/ Cara Perhitungan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung berdasarkan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

3. Capaian Indikator

Nilai Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada Tahun 2025 Bulan Mei sebesar 65.79 (*screenshot dashboard* terlampir). Dengan nilai tersebut, maka Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang termasuk dalam kategori “Cukup”. Nilai Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang ini terdiri dari:

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 17,54

Nilai tersebut didapat dari rumus :

$$\text{Perencanaan} = [(CRO \times 75\%) + (\text{Penggunaan SBK} \times 10\%) + (\text{Efisiensi SBK} \times 15\%)] \times 50\%$$

Evaluasi perencanaan anggaran dilakukan melalui penilaian kinerja perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja tematik. Penilaian kinerja anggaran diukur melalui efektivitas penggunaan anggaran yaitu berdasarkan capaian output dan diukur melalui efisiensi penggunaan anggaran yang dilihat dari hubungan sumber daya yang digunakan untuk capaian output. Berikut nilai kinerja perencanaan anggaran BKK Kelas I Padang tahun 2024 :

Tabel 3.15
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BKK Kelas I Padang
Semester I Tahun 2024

Indikator	Nilai	Bobot
Capaian Rincian Ouput	35,92	75%
Penggunaan SBK	81,25	10%
Efisiensi SBK	0	15%

Capaian rincian output (CRO) BKK Kelas I Padang sampai dengan Bulan Mei Tahun 2025 sebesar 35,92%, nilai Penggunaan SBK sebesar 81,25 dan efisiensi SBK masih "0" dikarenakan perhitungan Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi. Sehingga nilai kinerja perencanaan anggaran saat ini hanya sebesar 17,54.

- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 48,25

Nilai tersebut didapat dari rumus :

$$\begin{aligned} \text{Pelaksanaan} = & (\text{Revisi DIPA} + \text{Deviasi Hlm III DIPA} + \text{Penyerapan Anggaran} \\ & + \text{Belanja Kontraktual} + \text{Penyelesaian Tagihan} \\ & + \text{Pengelolaan UP dan TUP} + \text{Capaian Output} \\ & - \text{Dispensasi SPM}) \times 50\% \end{aligned}$$

Evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu kualitas perencanaan

pelaksanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Berikut nilai kinerja pelaksanaan anggaran :

Tabel 3.16
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Padang
Semester I Tahun 2025

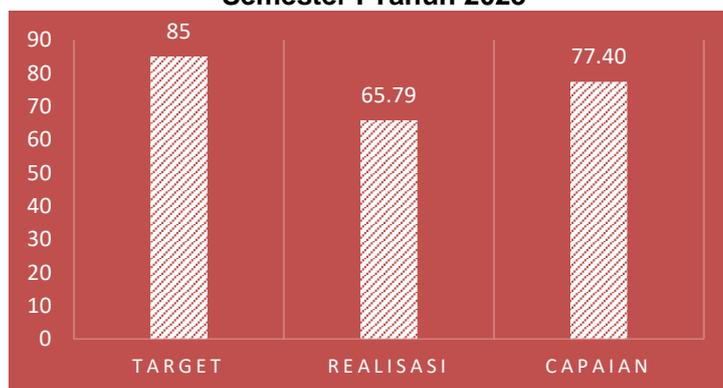
Aspek	Indikator	Nilai
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	10,00
	Deviasi Hal 3 DIPA	14,16
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	19,36
	Belanja Kontraktual	10,00
	Penyelesaian Tagihan	10,00
	Pengelolaan UP dan TUP	10,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	22.98
Pengurangan	Dispensasi SPM	0

Sehingga berdasarkan nilai tersebut Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 48,25.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.26
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran
Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran pada Semester I tahun 2025 sebesar 65,79 atau sebesar 77,40% dimana nilai ini masih dalam kategori cukup. Sehingga diharapkan kedepannya bisa meningkatkan nilai kinerja anggaran agar mencapai target yang ditentukan yaitu dengan memaksimalkan nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

- B. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir hingga akhir tahun 2025 (Tahun 2021 s.d. akhir tahun 2025). Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran dari tahun 2021 sampai dengan 2025 bisa di dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.27
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 s.d akhir tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran dari tahun 2021 s.d 2025 terus mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 91,28. Nilai Kinerja Anggaran pada semester I tahun 2025 masih berada pada nilai 65,79 dan belum mencapai target tahun 2025 sebesar 85.

- C. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK BKK Kelas I Padang 2020 - 2024).

Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2025 dengan RAK 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

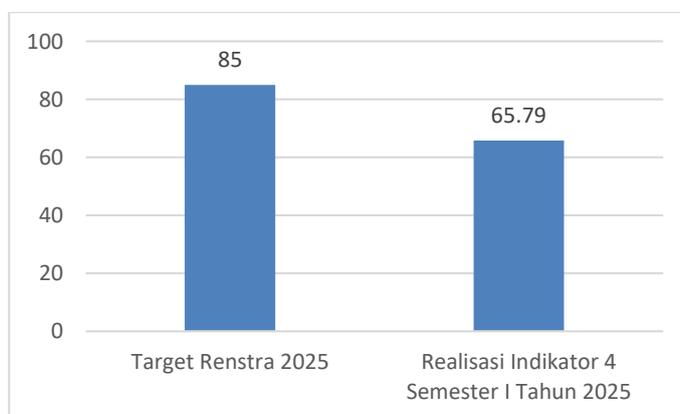
Grafik 3.28
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2025 Dengan RAK BKK Kelas I Padang 2020 - 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Padang selama lima tahun berturut-turut telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 109,98. Namun nilai kinerja anggaran semester I tahun 2025 belum mencapai target yaitu dengan capaian sebesar 77,40.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Standar Nasional

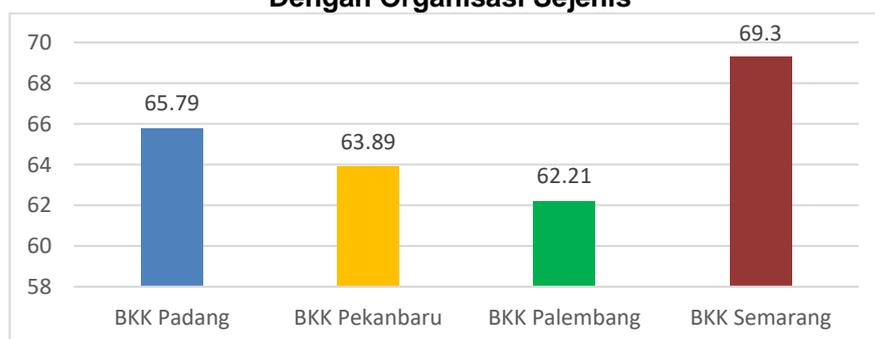
Grafik 3.29
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2025 Dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan



Target Nilai Kinerja Penganggaran pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 sebesar 85 namun realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran pada BKK Kelas I Padang Semester I Tahun 2025 belum mencapai target yaitu sebesar 65,79.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Organisasi Setara/ sejenis

Grafik 3.30
Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2025 Dengan Organisasi Sejenis



Dari grafik di atas dapat dilihat perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Padang dengan satuan kerja sejenis yaitu Balai Kekearifan Kesehatan yang seluruhnya merupakan Kelas I. Grafik menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Padang lebih rendah dibandingkan BKK Kelas I Semarang dan lebih tinggi dari BKK Kelas I Pekanbaru dan BKK Kelas I Palembang.

5. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan

- Pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- Melakukan revisi kegiatan terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
- Melakukan revisi anggaran terhadap anggaran yang tidak bisa direalisasikan.
- Melakukan akselerasi dan optimalisasi anggaran pelaksanaan kegiatan.
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik.
- Mempercepat realisasi anggaran setelah sebelumnya terdapat *lock* pagu anggaran perjalanan dinas pada semester I.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Capaian nilai kinerja anggaran belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 65,79%. Sampai saat ini perencanaan anggaran yang dilihat dari capaian rincian output masih berproses, nilai terendah pada perencanaan anggaran yaitu dari efisiensi SBK.

7. Kendala yang dihadapi

- Terbitnya KMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran yang mengakibatkan perubahan dalam perhitungan penilaian Nilai Kinerja Anggaran.
- Aplikasi Monev Kemenkeu membutuhkan waktu dalam migrasi data dari SAKTI sehingga pelaporan Nilai Kinerja anggaran perbulannya sering terlambat.
- Realisasi anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA.
- Terdapat blokir kegiatan dan perjalanan dinas pada semester I yang menyebabkan keterlambatan pada realisasi dan pencapaian target output.

8. Pemecahan Masalah

- Melakukan input data capaian output secara tepat waktu sesuai jadwal dari KPPN yaitu selama 5 hari kerja bulan setelahnya.
- Komitmen pengelola program dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai dengan RPK dan RPD yang telah ditetapkan.
- Melakukan revisi kegiatan dan revisi anggaran untuk kegiatan dan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan.
- Melakukan optimalisasi dan akselerasi pelaksanaan realisasi anggaran dan kegiatan.

9. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi satuan kerja yang dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi yaitu capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir dan realisasi anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan : E = Efisiensi
NE = Nilai Efisiensi
PAK = Pagu Alokasi
RAK = Realisasi Anggaran
CK = Capaian Kinerja

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 4 dapat dilihat sebagai berikut :

$$100\% = \frac{((179.400.000 \times 0.77) - 0)}{(179.400.000 \times 0.77)} \times 100\%$$

$$300\% = (50\% + \left(\frac{100}{20} \times 50\right))$$

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa efisiensi pada indikator 4 sebesar 100% yaitu dengan realisasi anggaran pada indikator 4 sebesar Rp.0,- dari pagu anggaran sebesar Rp.179.400.000,- atau sebesar 0% dari pagu anggaran sedangkan capaian pada indikator 4 sebesar 77,4%. Hal ini terjadi karena adanya blokir anggaran pada kegiatan indikator 4. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan realisasi sehingga efisiensi mencapai 100% dan nilai efisiensi sebesar 300%.

INDIKATOR KELIMA

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah maka perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang di dalamnya mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

1. Definisi Operasional

Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/Satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

2. Rumus/Cara Perhitungan

Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan pengelolaan UP dan TUP, capaian output serta pengurang dari dispensasi SPM.

$$\frac{\sum \text{Capaian Nilai IKPA}}{\sum \text{Target Indikator 7}} \times 100\%$$

3. Capaian Indikator

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

IKPA memiliki 7 indikator yang terfokus pada 3 aspek yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran (25%), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (50%) dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%). Berdasarkan data yang ada di aplikasi OM-SPAN, nilai IKPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang di tahun 2024 adalah tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2025

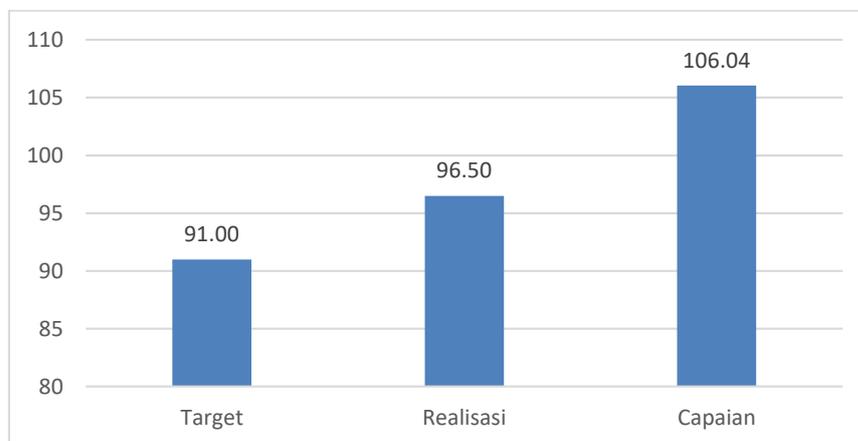
Keterangan		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	97,20
	Deviasi Halaman III DIPA	94,39	15	14,16	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	96,80	20	19,36	99,20
	Belanja Kontraktual	100	10	10	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	91,91	25	24,53	91,91
Nilai Total		96,50			
Konversi Bobot		100%			
Dispensasi SPM (Pengurang)		0			
Nilai Akhir		96,50			

Dilihat dari tabel nilai IKPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang pada Semester I Tahun 2025 dengan data pada bulan Mei 2025 sebesar 96,50 yang dihitung dari akumulasi dari 3 aspek penilaian dengan nilai tertinggi yaitu pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran dan nilai terendah pada aspek kualitas perencanaan anggaran.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi Nilai IKPA Semester I Tahun 2025 bisa di dapat dilihat pada grafik berikut ini:

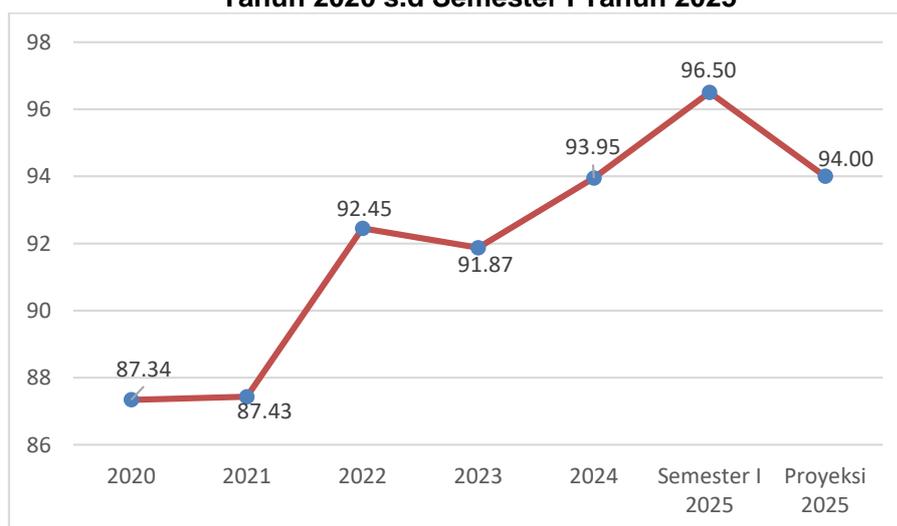
Grafik 3.31
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai IKPA Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target Nilai IKPA Semester I Tahun 2025 sebesar 91,00 telah tercapai dengan realisasi sebesar 96,50 (data Bulan Mei 2025 dari aplikasi OMSPAN) dengan capaian sebesar 101,02%.

- B. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2025)

Grafik 3.32
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai IKPA Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025

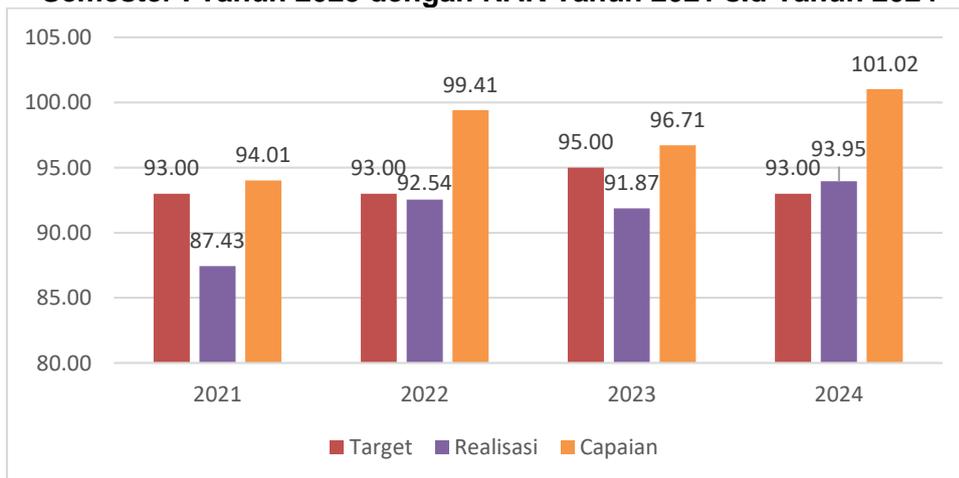


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai IKPA pada Semester I Tahun 2025 (data Bulan Mei 2025 dari aplikasi OMSPAN) merupakan nilai tertinggi sejak tahun 2020. Nilai IKPA diproyeksikan sebesar 94,00 pada akhir

tahun 2025 dengan memproyeksikan terdapat kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan adanya efisiensi.

- C. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2021 s.d. Tahun 2024)

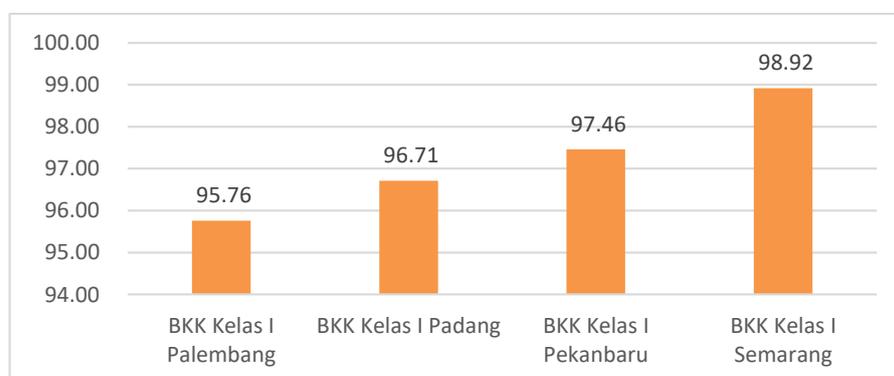
Grafik 3.33
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai IKPA
Semester I Tahun 2025 dengan RAK Tahun 2021 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa hingga tahun 2023 indikator 5 belum mencapai target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2024 dan semester I tahun 2025 indikator 5 berhasil mencapai target yang ditentukan. Nilai IKPA pada semester I tahun 2025 merupakan nilai tertinggi pada beberapa tahun terakhir.

- D. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Organisasi Setara/ sejenis

Grafik 3.34
Perbandingan Capaian Indikator Nilai IKPA Semester I Tahun 2024
Dengan Organisasi Sejenis



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai IKPA BKK Kelas I Padang lebih tinggi dibanding BKK Kelas I Palembang namun masih lebih rendah dari BKK Kelas I Pekanbaru dan BKK Kelas I Semarang.

4. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

- Melakukan pemutakhiran data RKAKL/DIPA, apabila terdapat revisi POK;
- Tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan;
- Tetap melaksanakan pengendalian revisi DIPA secara sangat selektif, memperbaiki aspek perencanaan kegiatan dan anggaran agar sesuai kebutuhan.
- Khusus untuk Deviasi Halaman III DIPA, satker K/L perlu dihimbau agar segera memperbaiki perencanaan kegiatan dan jadwal penarikan dananya.
- Senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP, dan penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran untuk menghindari adanya dispensasi SPM.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan Indikator

Capaian indikator 5 pada Semester I tahun 2025 telah mencapai target yaitu sebesar 106,04% dari target, hal ini dikarenakan dengan memaksimalkan nilai-nilai dari seluruh aspek penilaian pada IKPA yaitu aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

6. Kendala/ Permasalahan

- Terdapat efisiensi anggaran pada awal periode 2025 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tertunda begitu juga dengan realisasi dana.
- Realisasi anggaran perbulannya tidak sesuai dengan rencana penarikan dana.
- Terdapat kendala dalam pengadaan belanja modal berupa alat kesehatan pada aplikasi INAPROC yang dianggarkan pada triwulan II tapi belum bisa dilaksanakan sampai berakhirnya triwulan II.

7. Pemecahan Masalah

Adapun pemecahan masalah yang telah dilakukan terkait Indikator Nilai IKPA selama tahun 2024 adalah:

- Melakukan input rencana penarikan dana disesuaikan dengan realisasi dan rencana penarikan dana.
- Melakukan revisi efisiensi anggaran disesuaikan dengan prioritas kegiatan sehingga kegiatan masih dapat terlaksana dan memenuhi target output.
- Melaksanakan realisasi anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah dibuat sebelumnya.
- Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisais belanja modal.

8. Analisa Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi satuan kerja yang dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi yaitu capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir dan realisasi anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan : E = Efisiensi
 NE = Nilai Efisiensi
 PAK = Pagu Alokasi
 RAK = Realisasi Anggaran
 CK = Capaian Kinerja

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 5 dapat dilihat sebagai berikut :

$$51,10\% = \frac{((13.382.968.000 \times 1,06) - 6.937.599.284)}{(13.382.968.000 \times 1,06)} \times 100\%$$

$$168,05\% = (50\% + \left(\frac{47,22}{20} \times 50\right))$$

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa efisiensi pada indikator 5 sebesar 47,22% yang artinya sangat efisien karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan realisasi anggaran. Tingginya nilai efisiensi dikarenakan beberapa kegiatan tetap dilaksanakan walaupun anggaran kegiatan tersebut terdampak efisiensi anggaran, nilai pagu pada indikator 5 sebesar Rp.13.382.968.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.937.599.284,- atau sebesar 51,84% dengan pagu efisiensi sebesar Rp.982.764.000,-.

INDIKATOR KEENAM

Kinerja Implementasi WBK Satker

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani secara cepat, tepat dan professional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka perlu dibangun pilot project dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya Reformasi Birokrasi.

1. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

2. Rumus/ Cara Perhitungan

Nilai implementasi WBK Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil. Oleh karena itu dihitung hanya 1 kali saja dalam 1 tahun berdasarkan penilaian WBK oleh Tim Penilai Internal bagian Hukum, Organisasi dan Masyarakat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

4. Capaian Indikator

Berdasarkan penilaian hasil Desk Review Kinerja Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal kementerian Kesehatan pada tanggal 3 Desember 2024 diperoleh nilai Komponen Pengungkit sebesar 49,15 dan Komponen Hasil diperoleh nilai sebesar 32,93, sehingga total penilaian sebesar 82,00. Untuk tahun 2025, Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker masih menggunakan nilai pada tahun 2024 yang dapat dilihat dari tabel berikut :

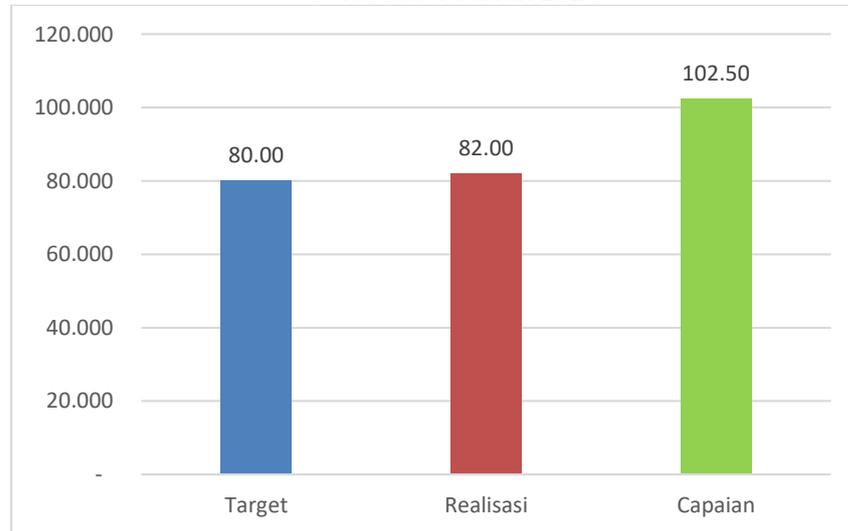
Tabel 3.18
Hasil Review Kinerja Impelentasi WBK Semester I Tahun 2025

No.	Materi	Nilai Maksimal	Nilai Perolehan
I	<u>KOMPONEN PENGUNGKIT</u>	60	49,16
	A Aspek Pemenuhan	30	24,37
	1 Manajemen Perubahan	4	2,77
	2 Penataan Tatalaksana	3,5	3,50
	3 Penataan Sistem manajemen SDM	5	4,18
	4 Penguatan Akuntabilitas	5	4,11
	5 Penguatan Pengawasan	7,5	5,75
	6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	4,05
	B Aspek Reform	30	24,79
	1 Manajemen Perubahan	4	3,33
	2 Penataan Tatalaksana	3,5	3,00
	3 Penataan Sistem manajemen SDM	5	2,93
	4 Penguatan Akuntabilitas	5	4,28
	5 Penguatan Pengawasan	7,5	6,25
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	5	
II	<u>KOMPONEN HASIL</u>	40	32,84
	1 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,5	15,83
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,5	14,58
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	1,25
	2 Pelayanan Publik yang Prima	17,5	17,01
Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey eksternal)	17,5	17,01	
TOTAL NILAI		100	82,00

Dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80 maka capaian target kinerja Implementasi WBK Satker sebesar 102,50%.

- A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025
 Perbandingan target dan realisasi Kinerja implementasi WBK satker Semester I Tahun 2025 bisa didapat dilihat pada grafik berikut ini:

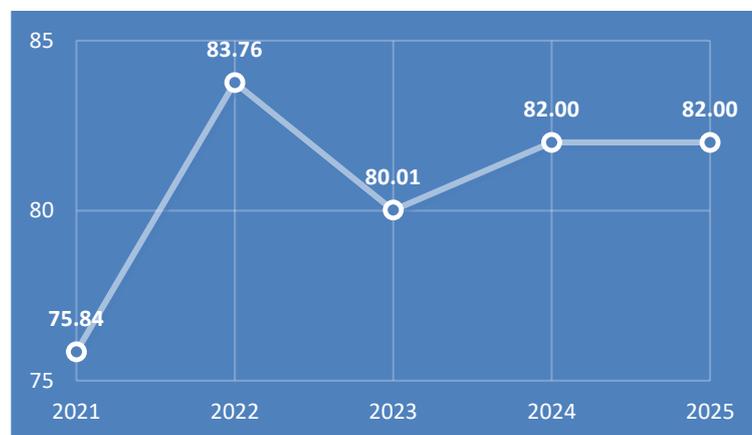
Grafik 3.35
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target Kinerja implementasi WBK satker sebesar 80 telah tercapai dengan nilai realisasi Kinerja implementasi WBK satker Tahun 2024 sebesar 82,00 atau sebesar 102,6% dari target.

- B. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)
 Perbandingan capaian Kinerja implementasi WBK satker dari tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2025 bisa di dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.36
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2025

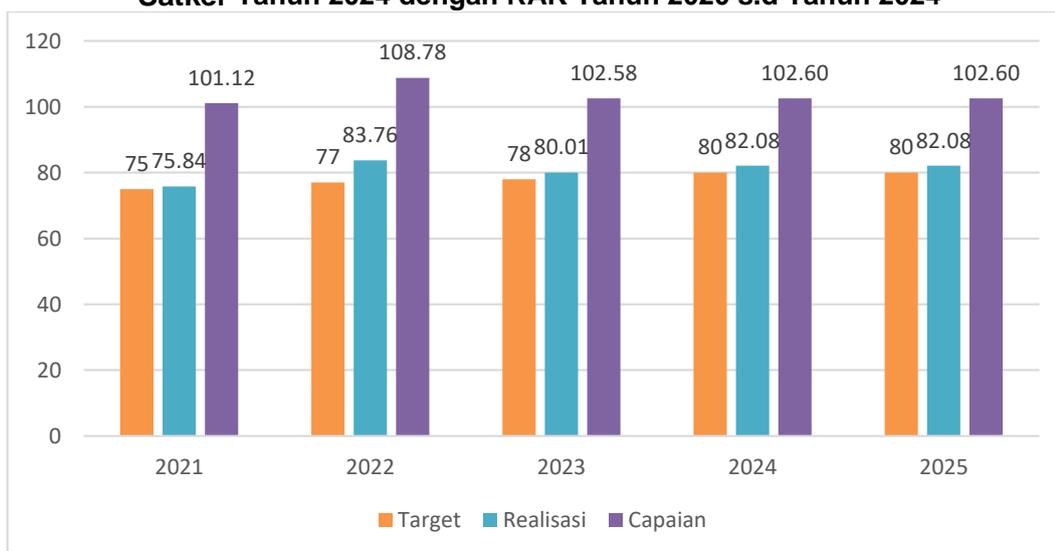


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja implementasi WBK satker pada semester I tahun 2025 masih sama dengan capaian tahun 2024 karena memang masih menggunakan nilai pada tahun 2024 tersebut. Capaian indikator 6 tahun 2024 ini merupakan hasil Assessment dari Tim Penilai Internal bagian Hukum, Organisasi dan Masyarakat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

Perbandingan capaian realisasi Kinerja implementasi WBK satker semester I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020 s.d. Tahun 2024) bisa di dapat dilihat pada grafik berikut ini:

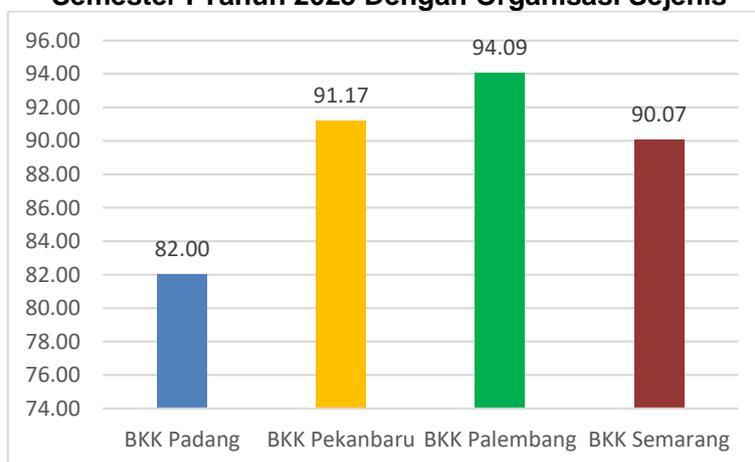
Grafik 3.37
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2024 dengan RAK Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Kinerja implementasi WBK satker BKK Kelas I Padang sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan kedepannya untuk terus meningkatkan capaian sehingga bisa memenuhi target jangka menengah pada RAK 2020-2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Organisasi Setara/ sejenis

Grafik 3.38
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Semester I Tahun 2025 Dengan Organisasi Sejenis



Perbandingan dengan organisasi setara atau sejenis yaitu dengan Balai Kekearifan Kesehatan yang berda pada Kelas I. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja implementasi WBK satker BKK Kelas I Padang sebesar 82,08% paling rendah dibandingkan dengan BKK sejenis sehingga diharapkan pada tahun sebelumnya nilai akan lebih baik.

5. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

- Menyusun rencana dan agenda kerja;
- Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Kekearifan Kesehatan Kelas I Padang

6. Analisa Penyebab Keberhasilan Capaian Indikator

- Adanya peran aktif Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Padang selaku Duta Prestasi dalam membangun budaya anti korupsi.
- Hasil penilaian kinerja implementasi WBK satker pada umumnya diatas 70 hanya pada pokja Penguatan Pengawasan masih di bawah 70.
- Komitmen bersama seluruh level organisasi dari pimpinan hingga staf untuk implementasi WBK secara konsisten dan bertanggungjawab.
- Konsisten dalam pelaksanaan Survey Eksternal terkait Nilai Survey Persepsi Korupsi dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan.
- Telah terdapat Penyuluh Anti Korupsi dalam rangka membangun karakter berintegritas dan budaya anti korupsi di Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Padang.

7. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- Koordinasi dengan pihak Lintas Sektor masih lemah.
- Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan kegiatan Tim WBK BKK Kelas I Padang sehingga belum bisa menyampaikan laporan kegiatan dalam tepat waktu.
- Agent of Change (AoC) belum bisa berperan seperti yang diharapkan sehingga perubahan yang diinginkan belum terlaksana dengan baik.
- Kurangnya semangat Tim dalam pengelolaan administrasi WBK.

8. Pemecahan Masalah

- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dengan cara mengadakan pertemuan dan sosialisasi
- Meningkatkan koordinasi antar Tim WBK dengan mengaktifkan Tim pendukung seperti Tim Unit Pengendali Gratifikasi, Tim Benturan Kepentingan, Tim SOP-SP, Tim SIPIT dan lainnya.
- Mengikutsertakan Agent of Change (AoC) dalam kegiatan pendukung seperti terlibat dalam Pangkalan SBH Krida Pengendalian Penyakit Ditjen P2P.
- Melaksanakan penguatan kapasitas Tim WBK secara berkesinambungan baik dalam bentuk Workshop, Outbond dan lainnya.

9. Analisa Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi satuan kerja yang dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi yaitu capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir dan realisasi anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :
E = Efisiensi
NE = Nilai Efisiensi
PAK = Pagu Alokasi
RAK = Realisasi Anggaran
CK = Capaian Kinerja

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 5 dapat dilihat sebagai berikut :

$$92,45\% = \frac{((26.536.000 \times 1,02) - 2.043.044)}{(26.536.000 \times 1,02)} \times 100\%$$

$$281,13\% = (50\% + \left(\frac{92,45}{20} \times 50\right))$$

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa efisiensi pada indikator 6 sebesar 92,45% dikarenakan pencairan anggaran masih jauh dari pagu alokasi namun telah dilaksanakan rapat internal untuk persiapan assesmen. Diharapkan sampai dengan akhir periode tahun 2025 realisasi anggaran akan optimal dan capaian kinerja akan meningkat.

INDIKATOR KETUJUJUH

Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Peningkatan Kapasitas ASN merupakan pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Pengembangan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan klasikal yaitu tatap muka di kelas, dan pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas. *Outcome* indikator ini yaitu meningkatnya kapasitas ASN BKK Kelas I Padang untuk mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik.

1. Definisi Operasional

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pertemuan sosialisasi/seminar, workshop, magang dan kegiatan peningkatan SDM lainnya.

2. Rumus/ Cara Perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%

$$\frac{\sum \text{ASN yang ditingkatkan Kapasitas}}{\sum \text{Target Indikator 7}} \times 100\%$$

3. Capaian Indikator

Capaian kinerja Presentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Tahun 2024 sebagai berikut:

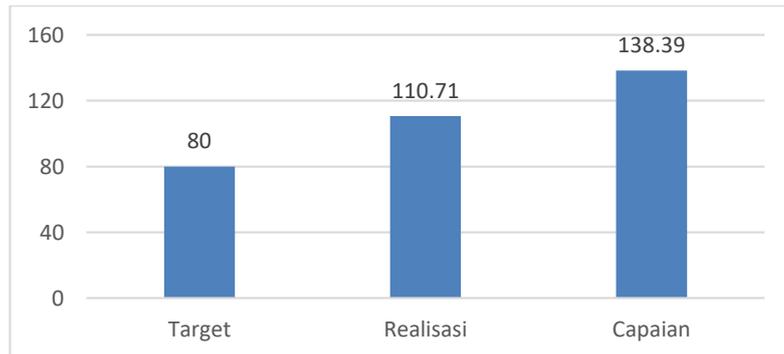
Tabel. 3.19
Capaian Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Tahun 2024

Sasaran Program / kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL	80% (56 orang)	110,71% (62 orang)	138,39%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Semester I Tahun 2025 bisa didapat dilihat pada grafik berikut ini:

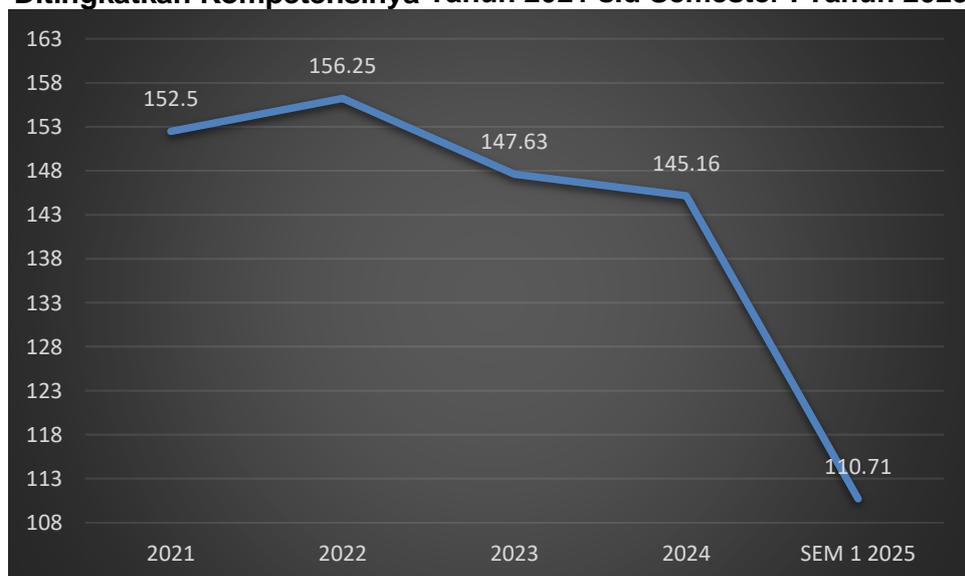
Grafik 3.39
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Semester I Tahun 2025



Dari grafik diatas dapat disimpulkan dari target yang di tetapkan bahwa 80% dari jumlah ASN BKK Kelas I Padang (56 orang) yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam kurun waktu 1 tahun dapat terealisasi sebanyak 110.71% (62 orang).

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2021 s.d. Tahun 2024)

Grafik 3.40
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN yang
Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2021 s.d Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Presentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL pada semester I tahun 2025 telah mencapai target namun lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

- C. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

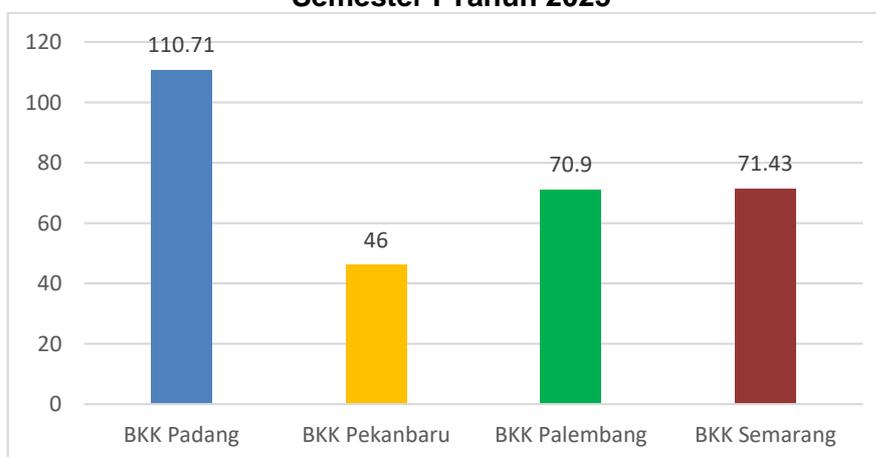
Grafik 3.41
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Semester I Tahun 2025 dengan RAK Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator 7 pada tahun 2020 hingga semester I tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

- D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Organisasi Setara/ sejenis

Grafik 3.42
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan Organisasi sejenis Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Semester I Tahun 2025 BKK Kelas I Padang sebesar 110,71% yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi sejenis yaitu BKK yang berada pada Kelas I yaitu BKK Kelas I Pekanbaru dan BKK Kelas I Palembang dan BKK Kelas I Semarang.

4. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator 7 yaitu dengan beberapa hal berikut :

- Memberikan informasi mengenai pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan fungsional pegawai di BKK Kelas I Padang.
- Melakukan monitoring secara periodik atas capaian peningkatan kapasitas ASN minimal 20 JP.

5. Analisa penyebab peningkatan/ penurunan Capaian Kinerja

Membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing baik melalui tugas belajar maupun izin belajar serta memberikan informasi mengenai peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan baik secara daring maupun tatap muka. Memberikan *reminder* kepada pegawai yang belum memenuhi peningkatan kapasitas minimal 20 JP setiap bulannya.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- Kesulitan dalam mencari pelatihan yang sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- Terdapat pelatihan yang sudah dianggarkan untuk dilakukan secara tatap muka tetapi masih dilakukan secara daring sehingga realisasi anggaran tidak dapat dilaksanakan.
- Pegawai tidak segera melaporkan peningkatan kapasitasnya sehingga menghambat kegiatan monitoring dan evaluasi.

7. Pemecahan Masalah

- Mencari secara aktif badan atau lembaga pelatihan, diklat, bimbingan teknis serta workshop yang bisa meningkatkan Kapasitas ASN

- Membuat *reminder* setiap bulan kepada seluruh pegawai untuk mengumpulkan hasil peningkatan kapasitas dan untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas.

8. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi satuan kerja yang dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi yaitu capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir dan realisasi anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :
 E = Efisiensi
 NE = Nilai Efisiensi
 PAK = Pagu Alokasi
 RAK = Realisasi Anggaran
 CK = Capaian Kinerja

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 7 dapat dilihat sebagai berikut :

$$98,32\% = \frac{((77.447.000 \times 1,38) - 1.800.000)}{(77.447.000 \times 1,38)} \times 100\%$$

$$295,8\% = (50\% + \left(\frac{98,32}{20} \times 50\right))$$

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa efisiensi pada indikator 7 sebesar 98,32%. Realisasi anggaran pada Indikator ini sebesar Rp.1.800.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.77.447.000,- atau sebesar 2,32% dari pagu anggaran sedangkan capaian kinerja pada indikator 7 sebesar 138,39%. Berdasarkan hal tersebut efisiensi indikator 7 yang didapat sebesar 98,32% karena terdapat pelatihan yang dilakukan oleh pegawai secara daring maupun *blended learning* sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator tersebut.

INDIKATOR KEDELAPAN

Persentase Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Penyerapan anggaran merupakan salah satu variable dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran yang terdiri dari capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian output program atau capaian rincian output (RO).

1. Definisi Operasional

Jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian output program atau capaian rincian output (RO) dibagi dengan Alokasi Anggaran terakhir dikali 100%.

2. Rumus/Cara Perhitungan

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus berikut :

$$\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Alokasi Anggaran}} \times 100\%$$

3. Capaian Indikator

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksana APBN. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian output program atau capaian rincian output (RO) yang memastikan kegiatan dapat terlaksana. Realisasi anggaran diharapkan bisa berjalan seiring dengan rencana kegiatan sehingga realisasi anggaran akan maksimal.

Data realisasi anggaran bersumber dari dokumen pencairan anggaran yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Data realisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dapat dilihat pada OM-SPAN yang tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20
Nilai Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
BKK Kelas I Padang Semester I Tahun 2025

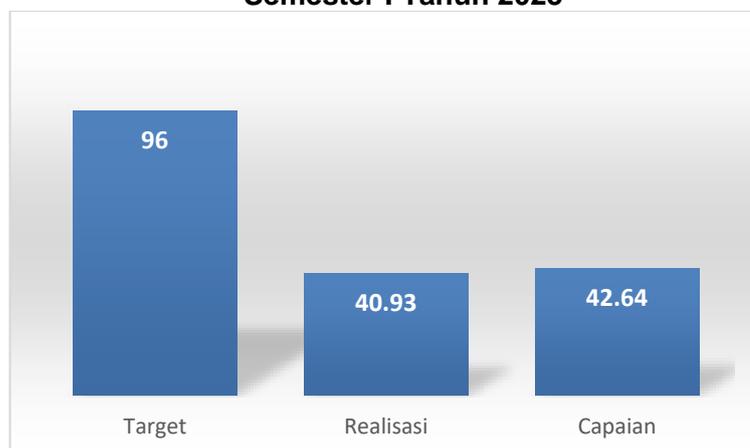
No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Belanja Pegawai	10,051,691,000	5,414,171,131	53,86%
2	Belanja Bahan	5,794,994,000	1,280,566,642	22,10%
3	Belanja Modal	516,280,000	2,400,000	0,46%
Total		16,362,965,000	6,697,137,773	40,93%

Berdasarkan tabel realisasi belanja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang di atas terlihat bahwa realisasi anggaran pada Semester I Tahun 2025 sebesar 40,93% dimana seluruh jenis belanja belum mencapai 60% realisasi dengan realisasi terendah pada belanja modal yaitu 0,46%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi Persentase Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2025 bisa di dapat dilihat pada grafik berikut ini:

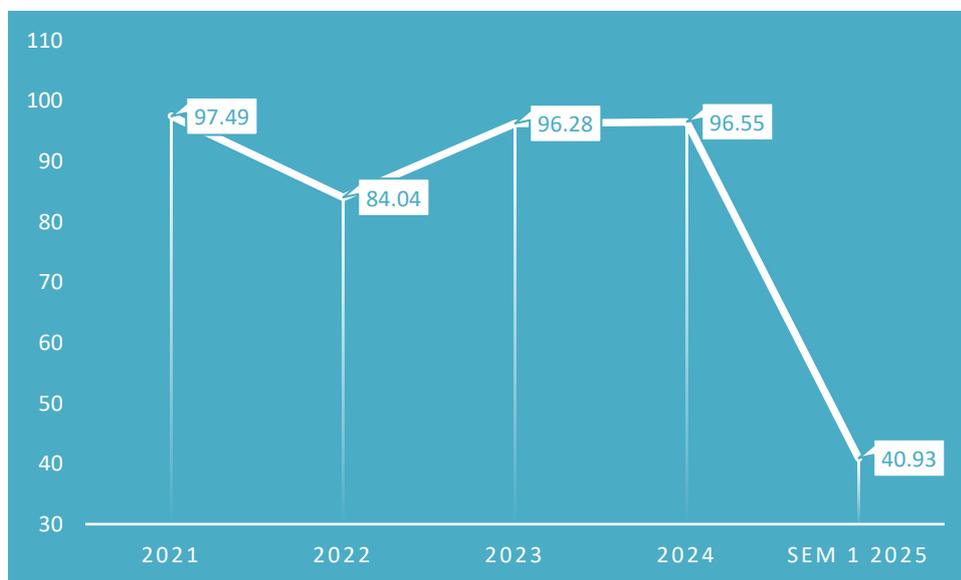
Grafik 3.43
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Anggaran
Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target Persentase Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2025 sebesar 40,93% atau sebesar 42,64% dari target.

- B. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2021 s.d. Tahun 2024)

Grafik 3.44
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2021 s.d Semester I Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Realisasi Anggaran pada Semester I Tahun 2025 masih rendah yaitu 40,93% dan diharapkan akan mencapai target 96% pada akhir periode tahun 2025.

- C. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020 s.d. Tahun 2024)

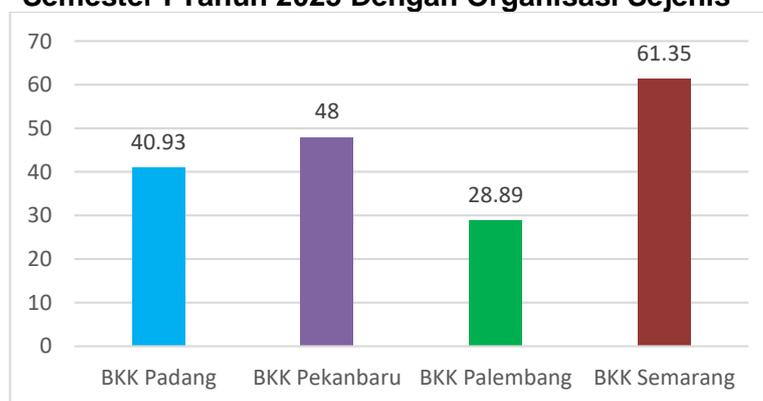
Grafik 3.45
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2025 dengan RAK Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Pada tahun 2023 terdapat penambahan indikator pada Perjanjian Kinerja Kepala yang merupakan penugasan direktif dari Menteri Kesehatan yang diturunkan menjadi indikator kinerja pimpinan tinggi pratama dan pimpinan satuan kerja pada masing-masing unit utama dan salah satunya yaitu indikator Persentase Realisasi anggaran. Sehingga indikator kedelapan dimulai sejak tahun 2023. Realisasi anggaran pada tahun 2023 dan 2024 telah memenuhi target yang ditentukan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Organisasi Setara/Sejenis

Grafik 3.46
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2025 Dengan Organisasi Sejenis



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Padang pada Semester I Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan organisasi sejenis yaitu BKK Kelas I Pekanbaru dan BKK Kelas I Semarang, namun lebih tinggi dibandingkan BKK Kelas I Palembang. Sehingga kedepannya diharapkan BKK Kelas I Padang dapat memaksimalkan realisasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

4. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Upaya yang dilakukan BKK Kelas I Padang dalam mencapai target Persentase Realisasi Anggaran adalah :

- Membuat rencana penarikan dana sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan revisi anggaran III DIPA jika terdapat kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.

- Melakukan Revisi POK saat membutuhkan revisi pemaksimalan realisasi anggaran di luar jadwal Revisi Hlm III DIPA.
- Mempercepat proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

5. Analisa Penyebab Kegagalan Indikator

Capaian indikator 8 pada semester I Tahun 2025 masih di bawah target pada semester I yaitu 50% dikarenakan terdapat belanja kegiatan yang dilaksanakan pada TW III, selain itu dengan adanya lock pagu menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus ditunda sehingga anggaran belum dapat direalisasikan.

6. Kendala/ Permasalahan

- Realisasi anggaran perbulannya tidak sesuai dengan rencana penarikan dana.
- Terdapat arahan blokir anggaran yang menyebabkan realisasi terhambat.

7. Pemecahan Masalah

Adapun pemecahan masalah yang telah dilakukan terkait Indikator Nilai IKPA selama tahun 2024 adalah:

- Melaksanakan realisasi anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah dibuat sebelumnya.
- Melaksanakan akselerasi realisasi anggaran setelah distribusi pagu blokir diumumkan oleh Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Melaksanakan revisi halaman III DIPA untuk memperbaiki RPD dan menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan satker.
- Melaksanakan revisi POK untuk melaksanakan revisi kegiatan sesuai dengan yang dibutuhkan di luar jadwal Revisi Hlm III DIPA.

8. Analisa Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi satuan kerja yang dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi yaitu capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir dan realisasi anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan : E = Efisiensi
 NE = Nilai Efisiensi
 PAK = Pagu Alokasi
 RAK = Realisasi Anggaran
 CK = Capaian Kinerja

Sehingga dengan rumus tersebut efisiensi pada indikator 8 dapat dilihat sebagai berikut :

$$4,81\% = \frac{((16,362,965,000 \times 0,43) - 6,697,137,773)}{(16,362,965,000 \times 0,43)} \times 100\%$$

$$62,03\% = (50\% + \left(\frac{4,81}{20} \times 50\right))$$

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa efisiensi pada indikator delapan sebesar 4,81% yang masih berada pada range -20 sampai dengan 20 yang artinya indikator kedelapan dinilai efisien karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan realisasi anggaran. Realisasi anggaran BKK Kelas I Padang semester I tahun 2025 sebesar Rp. 6.697.137.773,- atau sebesar 40,93% dari pagu anggaran sedangkan capaian kinerja pada seluruh indikator sebesar 42,64%. Sehingga kinerja anggaran pada semester I tahun 2025 dinilai efisien.

C. REALISASI ANGGARAN

1. Anggaran Pengeluaran

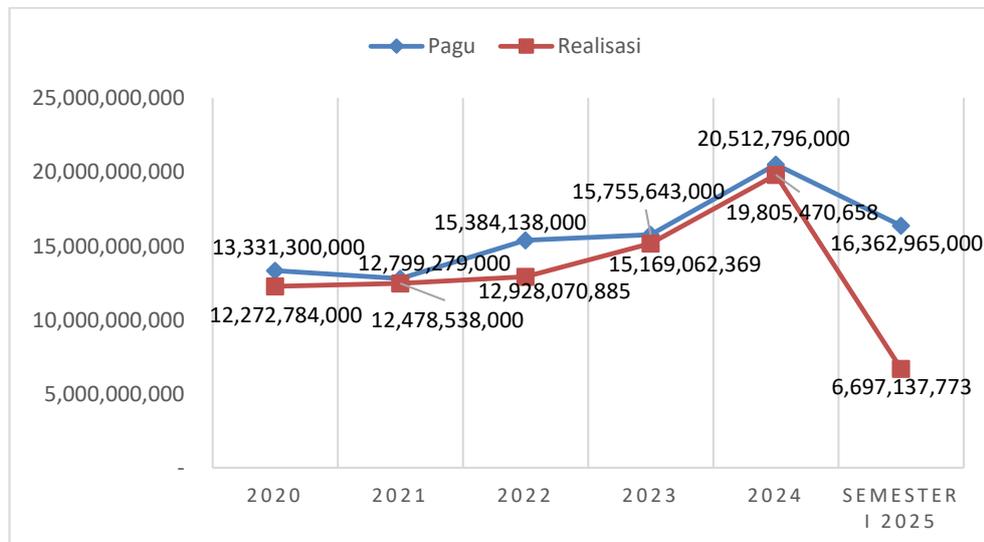
Pagu BKK Kelas I Padang Tahun 2025 senilai Rp.16.362.965.000,- dengan realisasi pada Semester I tahun 2025 sebesar Rp.6.697.137.773,- atau sebesar 40,93% dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.21
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Semester I Tahun 2025

MAK	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian
51	Pegawai	Rp. 10,051,691,000	Rp. 5,414,171,131	53,86%
52	Barang	Rp. 5,794,994,000	Rp. 1,280,566,642	22,10%
53	Modal	Rp. 516,280,000	Rp. 2,400,000	0,46%
Jumlah		Rp.16,362,965.000	Rp. 6,697,137,773	40,93%

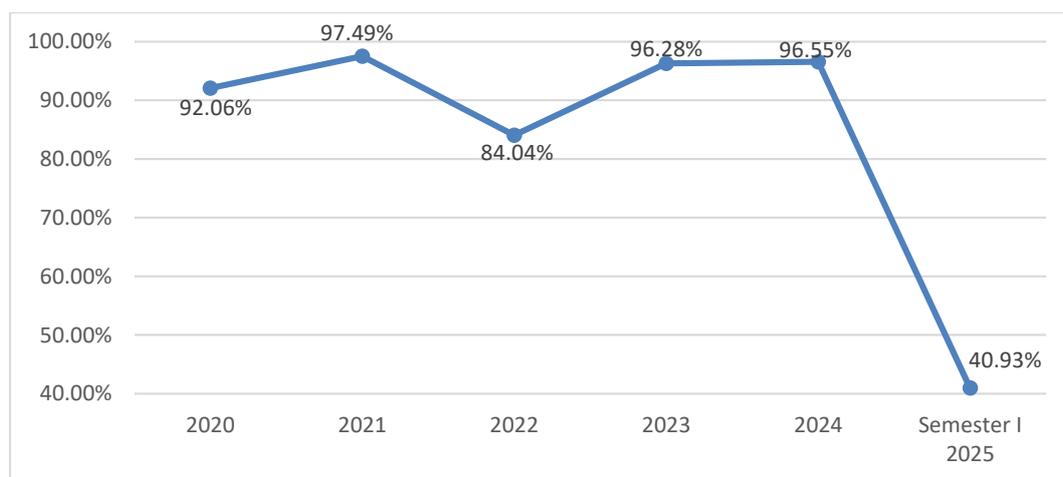
Realisasi belanja pegawai BKK Kelas I Padang Semester I tahun 2025 sebesar Rp.5.414.171.131,- atau 53,86%, anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Realisasi belanja barang sebesar Rp.1.280.566.642,- atau 22,10% digunakan untuk membiayai layanan perkantoran dan kegiatan-kegiatan dari tim kerja untuk pencapaian indikator kerja. Realisasi belanja modal sebesar Rp.2.400.000,- atau sebesar 0,46% yang digunakan untuk pengadaan alat sanitasi lingkungan. Selanjutnya sebagai gambaran anggaran pengeluaran BKK Kelas I Padang Tahun 2020 s/d Semester I Tahun 2025 dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 3.47
Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2020 s.d Semester I 2025



Sampai dengan Semester I tahun 2025 telah dilakukan revisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu revisi efisiensi dan revisi halaman III DIPA. Revisi efisiensi dilaksanakan pada triwulan I dengan nilai blokir sebesar Rp.2.429.318.000,- sehingga pagu efektif pada tahun 2025 sebesar Rp.13.933.647.000,-. Realisasi anggaran secara persentase pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.48
Persentase Realisasi Anggaran tahun 2020 s.d Semester I 2025



Dari grafik tersebut terlihat bahwa Persentase Anggaran selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 berada di 96,55%. Sedangkan realisasi sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar 40,93% dan diharapkan akan mencapai target sebesar 96% pada akhir periode 2025.

2. Realisasi Anggaran Per Masing-Masing Indikator

Realisasi anggaran pada masing-masing indikator BKK Kelas I Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja
Semester I Tahun 2025

No	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Indeks deteksi faktor risiko di bandara / pelabuhan / PLBDN	1,754,793,000	212,448,600	12,11

No	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	129,490,000	12,498,600	9,65
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	812,331,000	81,183,800	9,99
4	Nilai kinerja anggaran	179,400,000	0	0,00
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	13,382,968,000	6,937,599,284	51,84
6	Kinerja implementasi WBK satker	26,536,000	2,043,044	7,70
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	77,447,000	1,800,000	2,32
8	Persentase Realisasi Anggaran	16,362,965,000	7,247,573,248	44,29

Data di atas merupakan hasil realisasi dari fa details dari aplikasi SAKTI dengan realisasi anggaran rata-rata masih di bawah 50% kecuali Nilai Indikator Kinerja Anggaran yang salah satu komponennya merupakan belanja mengikat. Realisasi terendah merupakan indikator Nilai Kinerja Anggaran yaitu sebesar 0% dikarenakan anggaran pada indikator tersebut diblokir seluruhnya.

3. Realisasi Anggaran Per Rincian Output

Terdapat dua kegiatan pada pagu anggaran BKK Kelas I Padang yaitu Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara Wilayah dengan pagu sebesar Rp.2.758.281.000,- dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan pagu Rp.13.604.684.000,-. Secara rata-rata realisasi pada setiap RO pada BKK Kelas I Padang sebesar 44,29% yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output Semester I Tahun 2025

No.	Kode	Rincian Output	Realisasi Anggaran		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	4249	Duk. Pelayanan Kekeantinaan di Pnt Msk Negara & Wilayah	2,758,281,000	306,131,000	11.10%
1	PEA001	Koordinasi Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	62,142,000	5,155,000	8.30%
2	QAA011	Pelayanan kesehatan haji	19,330,000	-	0.00%

No.	Kode	Rincian Output	Realisasi Anggaran		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	QAHU016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	86,186,000	5,992,800	6.95%
4	QAHU017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	107,874,000	10,802,600	10.01%
5	QAHU01	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan	178,200,000	31,110,000	17.46%
6	QAHU04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	329,600,000	89,440,000	27.14%
7	QAHU07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	36,780,000	9,242,600	25.13%
8	QAHU08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	164,136,000	27,176,000	16.56%
9	QAHU09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	8,676,000	2,554,000	29.44%
10	QAHU10	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	5,448,000	702,000	12.89%
11	QAHU11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	86,400,000	25,330,000	29.32%
12	QAHU12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	68,800,000	13,260,000	19.27%
13	QAHU13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	19,080,000	1,870,000	9.80%
14	QAHU14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	39,420,000	22,477,500	57.02%
15	QAHU15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	43,640,000	15,348,000	35.17%
16	QAHU19	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan	59,400,000	7,743,000	13.04%
17	QAHU21	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria katagori 2	6,880,000	3,200,000	46.51%
18	QAHU22	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD katagori II	2,880,000	-	0.00%
19	QAHU25	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I	312,800,000	-	0.00%
20	QAHU28	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori I	285,600,000	-	0.00%
21	RAB001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk	773,342,000	34,727,500	4.49%
22	TBC001	Pelatihan kesehatan	61,667,000	-	0.00%
	4815	Dukma Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	13,604,684,000	6,941,442,328	51.02%
23	EBA956	Layanan BMN	20,000,000	-	0.00%
24	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat	11,300,000	2,043,044	18.08%
25	EBA962	Layanan Umum	34,582,000	3,545,798	10.25%
26	EBA963	Layanan Data dan Informasi	150,000	-	0.00%
27	EBA994	Layanan Perkantoran	13,145,263,000	6,919,850,566	52.64%
28	EBC954	Layanan Manajemen SDM	6,802,000	-	0.00%
29	EBC996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	15,780,000	1,800,000	11.41%
30	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	141,496,000	-	0.00%
31	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	84,332,000	-	0.00%

No.	Kode	Rincian Output	Realisasi Anggaran		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
32	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	104,904,000	14,202,920	13.54%
33	EBD961	Layanan Reformasi Kinerja	15,236,000	-	0.00%
34	EBD974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	24,839,000	-	0.00%
Total			16,362,965,000	7,247,573,328	44.29%

Berdasarkan tabel di atas terdapat realisasi anggaran pada RO yang berada di 0% yaitu sebagai berikut:

- RO 4249.QAA.012 Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada semester II tahun 2025.
- RO 4249.QAH.U22 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD katagori II dikarenakan anggaran pada RO ini diblokir seluruhnya.
- RO 4249 QAH.U25 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I dikarenakan proses realisasi anggaran dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Juni 2025.
- RO 4249.QAH.U28 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori I dikarenakan kegiatan masih berjalan sampai bulan Juli 2025.
- RO 4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan dikarenakan anggaran pada RO ini diblokir seluruhnya.
- RO 4815.EBA.956 Layanan BMN masih proses pencairan dana.
- RO 4815.EBA.963 Layanan Data dan Informasi kesehatan dikarenakan anggaran pada RO ini diblokir seluruhnya.
- RO 4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM kesehatan dikarenakan anggaran pada RO ini diblokir seluruhnya.
- RO 4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan dikarenakan anggaran pada RO ini diblokir seluruhnya
- RO 4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi kesehatan dikarenakan anggaran pada RO ini diblokir seluruhnya.
- RO 4815.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada semester II tahun 2025.
- RO 4815.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan kesehatan dikarenakan anggaran pada RO ini diblokir seluruhnya

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sumber penerimaan BKK Kelas I Padang antara lain berasal dari buku ICV, vaksinasi, penerbitan dokumen, pemeriksaan pasien, pelayanan ambulans dan penerbitan sertifikat. Pada tahun 2024, ditargetkan penerimaan PNBP sebesar Rp. 430.965.000,-. Uraianya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 3.24
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No	Jenis Tarif	Akun	Vol	Realisasi
1	Jasa Pemeriksaan Kapal dalam Karantina (COP)	425314	131	Rp.32.725.000
2	Jasa Pengawasan Tindakan Sanitasi Kapal (SSCC / SSCEC)	425314	125	Rp. 42.250.000
3	Penerbitan Buku Kesehatan Kapal (Health Book)	425314	58	Rp. 7.565.000
4	Jasa Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal (PHQC)	425314	2.046	Rp. 96.765.000
5	Jasa Pemeriksaan obat-obatan dan alat kesehatan dalam rangka penerbitan sertifikat	425314	96	Rp. 1.435.000
6	Jasa Pelayanan Kesehatan			
	- Jasa Pemeriksaan/ Pengobatan	425313	1.669	Rp.33.380.000
	- Buku ICV	425315	11.745	Rp.293.625.000
	- Yellow Fever	425315	63	Rp.18.900.000
	- Surat Keterangan Medical Contraindication of Vaccination	425315	9	Rp.45.000
	- Vaksinasi Meningitis	425315	1.485	Rp.386.100.000
	- Vaksinasi Influenza	425315	38	Rp.7.790.000
	- Vaksinasi Tifoid	425315	3	Rp.615.000
	- Jasa Pemakaian Ambulan	425313	236	Rp.2.035.000
7	Jasa Pemeriksaan OMKABA Kapal	425313	97	Rp.9.700.000
8	Jasa Pemeriksaan/Pengawasan Penerbitan Sertifikat Kualitas Air	425313	224	Rp.11.200.000
9	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	425913	0	Rp.12.941.953
10	Sanksi dan Denda Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	425811	1	Rp. 22.681.250
Total Realisasi				Rp.979.753.000

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan PNBP terbanyak Vaksinasi Meningitis sejumlah Rp.386.100.000,- sementara itu realisasi penerimaan PNBP terendah dari Jasa Pemberian Surat Keterangan *Medical Contraindication of Vaccination* yaitu sebesar Rp.45.000,-.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Padang ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Semester I tahun 2025 sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Padang dengan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit tujuan yaitu meningkatnya pelayanan kekeantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BKK Kelas I Padang semester I tahun 2025 terdapat 5 indikator yang telah mencapai target dan 3 indikator yang masih belum mencapai target yang ditentukan dengan rata-rata capaian sebesar 97,20%. Capaian kinerja per indikator yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Indikator indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan / bandara/ PLBDN dengan capaian 98,95% dimana realisasi sebesar 0,94 dari target 0,95.
2. Indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan capaian 105,26% dimana realisasi sebesar 100% dari target 95%.
3. Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan capaian 106,38% dimana realisasi sebesar 1 dari target 0,94.
4. Indikator nilai kinerja anggaran dengan capaian 77,40% dimana realisasi sebesar 65,79 dari target 85.
5. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan capaian 106,04% dimana realisasi sebesar 96,50 dari target 91.
6. Indikator nilai kinerja implementasi WBK satker dengan capaian 102,05% dimana realisasi sebesar 82,00 dari target 80,00.
7. Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan capaian 138,39% dimana realisasi sebesar 110,71% dari target 80%.
8. Presentase realisasi anggaran dengan capaian 42,64% dimana realisasi sebanyak 40,93% dari target 96%.

Kinerja keuangan pada Semester I tahun 2025, data per 20 Juni 2025 berdasarkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi anggaran semua jenis belanja mencapai 40,93% atau sebesar Rp. 6.697.137.773,- dari total pagu sebesar Rp. 16.362.965.000,-, pada tahun 2025 terdapat revisi efisiensi dengan blokir pagu sebesar Rp. Rp.2.429.318.000.

Dalam proses mencapai target indikator kinerja kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang tentunya menghadapi berbagai permasalahan. Namun demikian BKK Kelas I Padang terus berusaha meningkatkan kinerja baik secara internal dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran, maupun secara eksternal dengan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi lintas program dan sektor terkait. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan di tahun 2025 diantaranya:

1. Komitmen kepala, tim kerja dan seluruh pegawai BKK Kelas I Padang untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan.
2. Peningkatan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan lintas sektor dan lintas program.
3. Penguatan jejaring kemitraan dan koordinasi dengan instansi di wilayah pelabuhan dan bandara untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan kekarantinaan kesehatan.
4. Penguatan Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan BKK Kelas I Padang .
5. Peningkatan dan penguatan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala secara berjenjang di lingkungan BKK Kelas I Padang.
6. Melakukan akselerasi realisasi anggaran demi percepatan realisasi kegiatan melalui revisi baik revisi halaman III DIPA maupun revisi POK.
7. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM sesuai dengan jabatan masing-masing
8. Penguatan dan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi berbasis online, untuk mempercepat update informasi dan pengelolaan program.
9. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam rangka mendorong meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Seluruh target indikator kinerja kegiatan BKK Kelas I Padang telah tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 97,20% namun masih terdapat masalah yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin meningitis untuk perjalanan umroh sehingga banyak terjadi risiko yaitu adanya vaksin palsu yang diterbitkan atas nama Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Padang.
2. Lambatnya pelaporan informasi dari fasyankes di wilayah kerja Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dalam menyampaikan informasi penyakit sehingga memperlambat dalam respon penyakit atau keterlambatan identifikasi sinyal.
3. Masih adanya TPP yang belum dilaksanakan pelaksanaan *labelling* dan SLHS yang menghambat untuk pelaksanaan target Pelabuhan dan Bandara Sehat.
4. Revisi efisiensi yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda dan rencana penarikan dana tidak sesuai.
5. Komitmen para pengelola kegiatan dalam pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan belum kompak dalam meningkatkan pencapaian kinerja.
6. Masih jauhnya target nilai WBK untuk mewujudkan BKK Kelas I Padang meraih WBK Kementerian Kesehatan dan WBK Nasional.
7. Masih terdapat pegawai yang belum memenuhi peningkatan kapasitas minimal 20 JPL.

Terkait dengan masalah yang terjadi pada Semester I tahun 2025, maka rencana tindak lanjut perbaikan pada yang akan datang agar bisa memaksimalkan capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan promosi pelayanan kesehatan baik secara langsung maupun melalui sosial media akan pentingnya vaksin meningitis sehingga bisa menekan risiko terbitan ICV palsu dan vaksin palsu yang diterbitkan atas nama Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Padang disamping itu membangun koordinasi maskapai, agensi, klinik, petugas keamanan dan penegak hukum terkait dalam penindakan pelanggaran kekejarantinaan kesehatan.
2. Memperkuat koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program baik melalui advokasi, sosialisasi kegiatan dan membangun komitmen bersama-sama dalam melaksanakan cegah tangkal penyakit melalui pintu masuk negara

sehingga mempercepat dalam pelaporan dan informasi penyakit dalam respon penyakit atau identifikasi sinyal.

3. Mendorong pembentukan forum pelabuhan/bandara sehat dan re-evaluasi terhadap forum pelabuhan/bandara sehat yang telah terbentuk dengan mendorong partisipasi pengelola pelabuhan/bandara sehat sehingga tidak ada lagi TPP yang belum dilaksanakan pelaksanaan *labelling* dan SLHS yang menghambat untuk pelaksanaan target Pelabuhan dan Bandara Sehat.
4. Menyusun prioritas kegiatan bersama-sama antara kepala kantor, kasubbag adum, kepala tim kerja dan pegawai BKK Kelas I Padang menyesuaikan dengan pagu efektif dan menyusun kembali rencana penarikan dana.
5. Meningkatkan koordinasi secara berkala terkait Aplikasi monev kemenkeu yang mengalami perubahan cara perhitungan dan *update* aplikasi yang menyebabkan monitoring dan evaluasi terhambat.
6. Memperkuat komitmen bersama para pengelola kegiatan dalam pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan untuk meningkatkan pencapaian kinerja dengan diadakannya kegiatan "*Team Work Manajemen*"
7. Meningkatkan kolaborasi antara PNS, P3K dan pegawai outsourcing dalam mendukung kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan BKK Kelas I Padang.
8. Memberikan informasi pelatihan kepada pegawai dan mendorong seluruh pegawai untuk memanfaatkan LMS Kemenkes untuk menambah ilmu dan pengetahuan untuk jabatan fungsional maupun umum.

PUSTAKA ACUAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKK Kelas I Padang Tahun Anggaran 2025

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BKK Kelas I Padang Bulan Juni tahun 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KKP Kelas II Padang Tahun 2024

Laporan Keuangan BKK Kelas I Padang Tahun 2025

Permenkes RI No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Peraturan MENPAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

LAMPIRAN
